

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan rahmat-Nya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se - Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 dapat terselenggara yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pimpinan atas upayanya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Dengan kata lain, LKjIP ini merangkum seluruh proses analisis terhadap program dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Utara dalam perspektif pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian sangat diharapkan agar data dan informasi yang disajikan dalam dokumen ini, dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan evaluasi sekaligus masukan (input) yang berharga demi penyempurnaan dan penyusunan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tergambar dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017.

Kefamenanu, 20 Maret 2018  
**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**  
  
**RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S. Pt**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.LATAR BELAKANG .....	1
B.GAMBARAN DAERAH.....	2
C.POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH.....	7
D.PERTUMBUHAN EKONOMI .....	14
E. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. RENCANA STRATEGIK .....	24
B. PERJANJIAN KINERJA .....	48
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>61</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	61
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	110
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
- <b>PERJANJIAN KINERJA 2017</b>	
- <b>PENGUKURAN KINERJA SASARAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2017 .....	62
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk menurut kelompok Usia.....	64
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tiga Tahun Terakhir .....	65
Tabel 1.4	Potensi Tanaman Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara .....	67
Tabel 1.5	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara .....	69
Tabel 1.6	Potensi dan Produksi Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara .....	72
Tabel 1.7	Luas Hutan Negara dan kawasan Lindung.....	73
Tabel 1.8	Tujuan Wisata Kabupaten Timor Tengah Utara .....	74
Tabel 1.9	Event Budaya Tahunan .....	75
Tabel 1.10	PDRB Per Kapita Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara .....	75
Tabel 1.11	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha .....	76
Tabel 1.12	Pendapatan Perkapita Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Kab. TTU dan Prov. NTT Tahun 2012-2016 .....	77
Tabel 1.13	Laju Inflasi Untuk Tujuh Kelompok Komoditas Barang dan Jasa di Kota Kefamenanu Tahun 2012-2016 .....	80
Tabel 1.14	Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017.....	82
Tabel 1.15	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 .....	83

## TABEL PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Sasaran 1 .....	62
Sasaran 2 .....	64
Sasaran 3 .....	65
Sasaran 4 .....	67
Sasaran 5 .....	69
Sasaran 6 .....	70
Sasaran 7 .....	72
Sasaran 8 .....	73
Sasaran 9 .....	74
Sasaran 10 .....	75
Sasaran 11 .....	75
Sasaran 12 .....	76
Sasaran 13 .....	77
Sasaran 14 .....	80
Sasaran 15 .....	82
Sasaran 16 .....	83
Sasaran 17 .....	86
Sasaran 18 .....	94
Sasaran 19 .....	95
Sasaran 20 .....	96
Sasaran 21 .....	97
Sasaran 22 .....	97
Sasaran 23 .....	98
Sasaran 24 .....	100
Sasaran 25 .....	100
Sasaran 26 .....	101
Sasaran 27 .....	102
Sasaran 28 .....	103
Sasaran 29 .....	103
Sasaran 30 .....	104
Sasaran 31 .....	105
Sasaran 32 .....	106

Sasaran 33 .....	107
Sasaran 34 .....	107
Sasaran 35 .....	108
Sasaran 36 .....	109

**TABEL AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017 .....	110
Penetapan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Per SKPD Tahun Anggaran 2017 .....	114



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

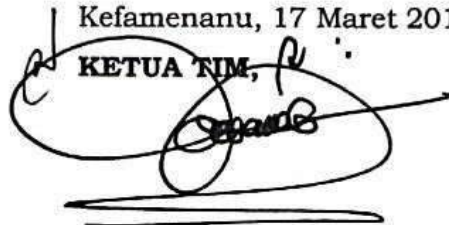
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kefamenanu, 17 Maret 2018

KETUA TIM,



 Drs. YAKOBUS TAEK, M. Si

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat, jelas, terukur diantaranya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah memiliki visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 – 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 sehingga dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya.

RPJMD ini hanya berlaku selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara yang dilantik pada 17 Februari 2016. RPJMD ini memberikan arah dan garis-garis besar pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan Visi yang terkandung didalamnya adalah :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERAH, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SERTA SUMBER DAYA ALAM SECARA LESTARI”***

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

- MISI I : Memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan.
- MISI II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, olah raga dan kepemudaan.
- MISI III : Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah.
- MISI IV : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- MISI V : Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek – Ume Mese, mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara serta optimalisasi pembangunan kawasan perbatasan.

Dari kelima misi itu di dukung oleh tujuan dan setiap tujuan didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut :

### **1) Misi I**

Didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a. Mengembangkan komoditas pertanian unggulan yang produktif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
  - 1. Meningkatnya produksi pertanian unggulan daerah.
  - 2. Meningkatnya ketahanan pangan.
  - 3. Mengoptimalkan potensi lahan kering dan lahan tidur.
- b. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  - 1. Revitalisasi dan refungsionalisasi koperasi dan UKM dalam memberdayakan perekonomian rakyat.



2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.
- c. Mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis SDA dan berwawasan lingkungan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu:
  1. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya pengelolaan potensi pariwisata.
  2. Meningkatnya investasi dalam daerah.

## **2) Misi II**

Didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Mengembangkan olah raga dan kepemudaaan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya kegiatan kepemudaan khususnya di bidang olah raga.
- d. Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja produktif. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memacu peran serta perempuan dalam pembangunan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memacu peran serta perempuan dalam pembangunan.

### **3) Misi III**

Didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
  2. Meningkatnya utilitas lingkungan dan rumah layak huni.

### **4) Misi IV**

Didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
  1. Terwujudnya layanan publik yang cepat dan tepat.
  2. Terwujudnya tertib perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
  2. Meningkatnya fungsi pengawasan.
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Penguatan implementasi otonomi desa. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Menguatnya kapasitas fiskal dan aparatur pemerintahan desa.

## 5) Misi V

Didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas manajemen struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Kefamenanu. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Mendorong penataan Kota Kefamenanu dan sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan jasa.
- b. Meningkatkan pengelolaan kawasan pesisir Pantai Utara. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir Pantai Utara.
- c. Meningkatkan pembangunan kawasan Perbatasan Negara. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu :
  1. Mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan negara

Secara umum, Pemerintah Daerah telah mencapai target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan pencapaian kinerja sasaran yang tertuang dalam RPJMD :

No.	Indikator Sasaran	Kategori Capaian Kinerja Sasaran
1.	<b>Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni</b>	
	Jumlah Rumah Layak Huni	Sangat Baik
2.	<b>Meningkatnya produksi produk pertanian unggulan kabupaten</b>	
	- Produksi Jagung	Cukup Baik
	- Produksi Kacang Tanah	Tidak baik
	- Produksi Bawang Putih Lokal	Tidak Baik
	- Produksi Padi	Sangat Baik
	- Cakupan Bina Kelompok Tani	Sangat Baik
3.	<b>Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara</b>	
	- Jumlah ternak hasil IB	Sangat Baik
	- Jumlah Populasi Ternak Sapi Bali	Sangat Baik
	- Luas Areal HMT per Kelompok Tani	Sangat Baik
	- Angka Kematian Ternak	Sangat Baik

No.	Indikator Sasaran	Kategori Capaian Kinerja Sasaran
4.	<b>Meningkatkan Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan</b>	
	- Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Terbantu	Sangat Baik
	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Sangat Baik
5.	<b>Meningkatnya Kompetensi Koperasi, UKM dan IKM</b>	
	- Jumlah Koperasi Aktif	Sangat Baik
	- Jumlah UKM terbina	Sangat Baik
	- Jumlah IKM terbina	Sangat Baik
6.	<b>Menguatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat</b>	
	- Jumlah BUMDes terbentuk	Sangat Baik
	- Jumlah Kelompok Tani Terbina	Sangat Baik
	- Jumlah Koperasi Desa Terbentuk	Sangat Baik
7.	<b>Tersediannya Pangan Utama</b>	
	- Jumlah Desa Rawan Pangan Tertangani	Tidak Baik
	- Tersedianya Lumbung Pangan Desa	Cukup Baik
	- Ketersediaan Pangan Utama	Tidak Baik
8.	<b>Meningkatnya Daya tarik Wisata</b>	
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Sangat Baik
9.	<b>Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Penghijauan</b>	
	Luas Lahan Kritis Yang Direboisasi	Tidak Baik
10.	<b>Tersedianya Sumber Air Minum Bagi Masyarakat</b>	
	Jumlah Mata Air Yang Terpelihara	Tidak Baik
11.	<b>Terkendalnya Tingkat Pencemaran</b>	
	Status Mutu Air Teruji	Sangat Baik
12.	<b>Meningkatnya Realisasi Investasi</b>	
	- Jumlah investor (PMA/PMDN)	Sangat Baik
	- Nilai Investasi	Sangat Baik
13.	<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Produktif</b>	
	- Jumlah tenaga kerja terlatih	Sangat Baik
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Sangat Baik
	- Ratio Ketergantungan	Sangat Baik
14.	<b>Meningkatnya Aksestabilitas dan Pemerataan Pendidikan</b>	
	- APM PAUD	Sangat Baik
	- APM SD	Sangat Baik
	- APM SMP	Sangat Baik
	- Angka Melek Huruf	Sangat Baik
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Sangat Baik
	- Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	
	- Sekolah SMP/MTS kondisi bangunan baik	
	- Angka kelulusan SD/MI	Sangat Baik
	- Angka Kelulusan SMP/MTs	Sangat Baik
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Sangat Baik
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Sangat Baik

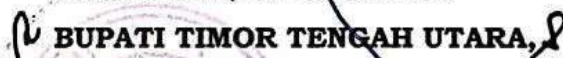
No.	Indikator Sasaran	Kategori Capaian Kinerja Sasaran
<b>15.</b>	<b>Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat dan Layanan Perpustakaan</b>	
	- Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten per tahun	Sangat Baik
	- Jumlah Desa Yang Memiliki Perpustakaan	Sangat Baik
	- Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan	Cukup Baik
	- Jumlah Buku Yang tersedia di Perpustakaan	Tidak Baik
<b>16.</b>	<b>Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah</b>	
	- Ratio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000)	Baik
	- Ratio posyandu persatuan balita (per 1000)	Sangat Baik
	- Ratio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000)	Sangat Baik
	- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Sangat Baik
	- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	Tidak Baik
	- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	Sangat Baik
<b>17.</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b>	
	- AKI (per 100.000 KH)	Sangat Baik
	- AKB (per 1000)	Sangat Baik
	- Gizi Buruk	Sangat Baik
	- Ratio ketersediaan obat	Sangat Baik
	- Angka Harapan Hidup	Sangat Baik
	- Cakupan kunjungan ibu hamil k4	Baik
	- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Baik
	- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Sangat Baik
	- Cakupan pelayanan nifas	Sangat Baik
	- Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Cukup Baik
	- Cakupan kunjungan bayi	Sangat Baik
	- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Sangat Baik
	- Cakupan pelayanan Balita	Sangat Baik
	- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Sangat Baik
	- Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Sangat Baik
	- Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan	Sangat Baik

No.	Indikator Sasaran	Kategori Capaian Kinerja Sasaran
	setingkat	
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Sangat Baik
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Sangat Baik
	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	Tidak Baik
	- Cakupan desa siaga aktif	Cukup Baik
<b>18.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB</b>	
	Cakupan Peserta KB Aktif	Sangat Baik
<b>19.</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Kualitas Kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	
	Jumlah PMKS yang dibantu	Sangat Baik
<b>20.</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	
	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	Tidak Baik
<b>21.</b>	<b>Lestarnya nilai-nilai budaya</b>	
	- Jumlah festival budaya yang diselenggarakan	Sangat Baik
<b>22.</b>	<b>Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga</b>	
	- Jumlah organisasi kepemudaan terbina	Sangat Baik
	- Jumlah klub olahraga yang dibantu	Sangat Baik
	- Jumlah even olahraga yang diselenggarakan	Sangat Baik
<b>23.</b>	<b>Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi</b>	
	- Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	Sangat Baik
	- Jumlah jembatan yang dibangun	Sangat Baik
	- Panjang saluran irigasi terbangun	Sangat Baik
<b>24.</b>	<b>Terkendalnya pemanfaatan ruang</b>	
	- Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah	Cukup Baik
	- Ketataan terhadap RTRW	Sangat Baik
<b>25.</b>	<b>Tersedianya sarana prasarana air bersih</b>	
	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Sangat Baik
<b>26.</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan</b>	
	Kepemilikan KIR angkutan umum	Sangat Baik
<b>27.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik</b>	
	- SKPD yang menyusun Renja tepat waktu	Sangat Baik
	- Penduduk ber -e-KTP	Sangat Baik
	- Ratio penduduk berakta kelahiran	Sangat Baik
	- Ratio pasangan berakta nikah	Baik
	- SKPD dengan pelaporan keuangan tepat waktu	Sangat Baik
	- Opini pengelolaan keuangan daerah	Baik

No.	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja
<b>35.</b>	<b>Berkembangnya Kawasan Pesisir Pantura</b>	
	- Jumlah kelompok nelayan terbina	Sangat Baik
	- Jumlah produksi perikanan tangkap	Sangat Baik
	- Tertatanya pelabuhan laut Wini	Sangat Baik
<b>36.</b>	<b>Berkembangnya Kawasan Perbatasan</b>	
	- Panjang jalan terbangun	Sangat Baik
	- Jumlah jembatan terbangun	Sangat Baik

Meskipun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik, namun tak dapat dipungkiri bahwa pada semua tingkatan manajemen masih juga terdapat banyak kekurangan. Beberapa catatan penting kekurangan dimaksud, digambarkan dalam dokumen ini dan perlu dibenahi pada tahun-tahun mendatang sehingga visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat tercapai.

Kefamenanu, 20 Maret 2018

 **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**



 **RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S. Pt**



**A. LATAR BELAKANG****1. Umum**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita – cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance ) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentunya memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat, jelas dan terukur. Salah satu diantaranya adalah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan LKjIP adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan kemasyarakatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan lagi kinerja (*performance*) instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan menuju terciptanya *good governance* (kepemerintahan yang baik).

### **b. Tujuan**

Sedangkan yang menjadi tujuan pelaksanaan penyusunan LKjIP adalah untuk mengetahui sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja, kebijakan, program dan kegiatan yang berbasis anggaran setiap tahun anggaran sekaligus melihat dan menilai keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi (TUPOKSI) yang diembannya, sesuai dengan visi dan misinya.

## **B. GAMBARAN DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu Kabupaten dari 6 (enam) kabupaten/kota yang ada di daratan Timor dan 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten TTU termasuk salah satu kabupaten dari 4 (empat) kabupaten di Propinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara RDTL.

Posisi Kabupaten Timor Tengah Utara secara astronomis, terletak antara 9° 2' 48" LS - 9° 37' 36" LS dan 124° 04' 02" BT - 124° 46' 00" BT dengan batas – batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu.

Kabupaten TTU memiliki daratan dengan luas 2.669,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan khusus wilayah lautan sebagian wilayah TTU berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura) yang memiliki luas lautan ± 950 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai ± 50 km.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten TTU terdiri dari 24 Kecamatan dan 193 Desa/Kelurahan (182 Desa dan 11 Kelurahan). Kecamatan-kecamatan di Kabupaten TTU yaitu Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Noemuti, Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu, Noemuti Timur, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Tanpah, Biboki Moenleu, Biboki Utara, Biboki Anleu dan Biboki Feotleu.

Berdasarkan kondisi penggunaan tanah terdapat luas tanah sebesar 253.120 ha yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan tanah yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun dan lain sebagainya. Penggunaan tanah adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dapat dikemukakan bahwa terdapat penggunaan tanah yang tergolong semak, alang-alang, dan padang menempati urutan tertinggi sebesar 23,68% dan hutan belukar/lebat sebesar 22,29%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,15%.

## 2. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2016 sebanyak 259.797 jiwa (sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara) dan pada 31 Desember 2017 sebanyak 266.360 jiwa (sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU). Rata-rata tingkat pertumbuhan selama kurun waktu Tahun 2016-2017 sebesar 1,02 %.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kota Kefamenanu yakni 661 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Biboki Feotleu sebanyak 36 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang juga cukup padat penduduknya (di atas 100 jiwa per km<sup>2</sup>) adalah Kecamatan Miomaffo Timur, Bikomi Tengah, Bikomi Selatan, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Insana Barat dan Insana Fafinesu, sedangkan Kecamatan yang lain kepadatan penduduknya berkisar 35 – 93 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2017 yakni 76 jiwa per km<sup>2</sup>, hal mana secara demografis tergolong kurang padat. Jumlah penduduk menurut kecamatan Tahun 2017, seperti pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	Rata-rata penduduk per Km <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Miomafo Barat	4.353	15.671	199.63	78,50
2	Miomafo Tengah	1.708	6.271	75.00	83,61
3	Musi	1.354	4.786	82.17	58,24
4	Mutis	1.836	7.297	90.50	80,62
5	Bikomi Nilulat	1.356	4.998	82.00	60,95
6	Bikomi Utara	1.736	6.411	70.70	90,67
7	Miomafo Timur	3.441	12.770	101.45	125,88
8	Bikomi Tengah	2.122	7.795	61.50	126,74
9	Bikomi Selatan	3.126	11.093	48.68	227,88
10	Naibenu	1.392	5.759	88.00	65,44
11	Noemuti	3.653	13.056	155.60	83,97
12	Noemuti Timur	1.200	4.377	55.77	78,49
13	Kota Kefamenanu	12.819	48.921	74.00	661,09

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	Rata-rata penduduk per Km <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
14	Insana	5.765	21.814	333.08	65,50
15	Insana Utara	2.503	9.954	53.84	184,88
16	Insana Barat	2.960	10.961	102.00	107,46
17	Insana Tengah	2.998	11.252	124.00	90,74
18	Insana Fafinesu	1.687	6.014	52.88	113,72
19	Biboki Selatan	2.624	9.916	164.17	60,40
20	Biboki Tanpah	1.475	5.532	99.15	55,79
21	Biboki Moenleu	1.915	8.023	85.78	93,52
22	Biboki Utara	2.799	11.433	138.70	82,42
23	Biboki Anleu	4.521	17.813	206.40	86,30
24	Biboki Feotleu	1.088	4.443	124.70	35,62
	<b>Jumlah</b>	<b>70.431</b>	<b>266.360</b>	<b>3484,20</b>	<b>76,44</b>

Sumber: Dispendukcapil Kab. TTU 2018

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15 – 64 tahun) dengan umur tidak produktif (umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk Kabupaten TTU yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2017 sebesar 64.807 jiwa atau 24,33 % dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 181.108 jiwa atau 67,99% dan yang berusia tua ( $\geq$  65 tahun) sebesar 20.445 jiwa atau 7,67%.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2017 seperti pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara**  
**Menurut Kelompok Usia Tahun 2017**

No	Struktur Usia	Jumlah
1.	0 - 4	9.144
2.	5 - 9	25.062
3.	10 - 14	30.601
4.	15 - 19	30.686
5.	20 - 24	23.466
6.	25 - 29	22.182
7.	30 - 34	19.692
8.	35 - 39	19.447
9.	40 - 44	15.680
10.	45 - 49	14.812
11.	50 - 54	14.177
12.	55 - 59	11.815
13.	60 - 64	9.151
14.	65 - 69	6.530
15.	70 - 74	5.319
16.	75 >	8.596
<b>TOTAL</b>		<b>266.360</b>

Sumber : Disdukcapil TTU 2018

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu kemampuan baca tulis, partisipasi pendidikan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kemampuan membaca dan menulis atau baca tulis merupakan keterampilan minimal yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai kesejahteraannya. Kemampuan baca tulis ini tercermin dari Angka Melek Huruf (AMH) yaitu presentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin. AMH penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017 yakni 90,16 %.

Kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup, berdampak pula pada struktur pendidikan terakhir para kepala rumah tangga di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari tahun ke tahun menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih baik, dari tingkat pendidikan yang rendah menuju ke tingkat pendidikan yang

lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan pendidikan mulai diperhatikan oleh masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten TTU, 2**  
**Tahun Terakhir**

No	Tingkat Pendidikan	2014		2015	
		Jumlah Laki-Laki dan Perempuan	%	Jumlah Laki-Laki dan Perempuan	%
1	Tidak sekolah/belum sekolah	10.727	10,36	8.259	7,06
2	Tidak atau Belum Tamat SD	14.691	14,19	14.916	12,75
3	SD	48.528	46,86	46.689	39,91
4	SLTP	8.540	8,25	18.291	15,64
5	SLTA	11.453	11,06	17.376	14,85
6	Diploma I/II/III	2.558	2,47	2.279	1,95
7	D IV/S1 dan S2/S3	7.057	6,81	9.162	7,83
Jumlah		103.554	100	116.972	100

Sumber : BPS Kab. TTU

### C. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berorientasi pada pengembangan potensi unggulan sebagai pengungkit kegiatan ekonomi daerah. Potensi yang sedang dikembangkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pertanian

Hingga saat ini, pertanian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Kabupaten Timor Tengah Utara (2013 = 44,18; 2014 = 43,35; 2015 = 42,83); 2016 = 41,83) atau hampir sebagian dari keseluruhan PDRB TTU. Besarnya sumbangan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh sumbangan sub sektor tanaman pangan dan sub sektor peternakan oleh karena luas lahan yang masih tersedia dan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup signifikan.

Produksi sub sektor tanaman pangan merupakan produksi utama bagi ketahanan pangan pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya, karena bagi mayoritas keluarga petani ketersediaan dan keteraksesan pangan serta kebutuhan hidup penting lainnya bergantung pada ketersediaan produksi pangan untuk konsumsi keluarga dan untuk diperjualbelikan guna memperoleh uang tunai.

Adapun potensi tanaman pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara diuraikan pada tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Potensi Tanaman Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Tanaman Pangan	Uraian	Tahun	
		2016*	2017
Padi (sawah dan ladang)	Luas Panen (ha)	34,23	12,034
	Produksi (ton)	28.590	44.528,8
	Produktivitas (kw/ha)	25,68	25,68
Jagung	Luas Panen (ha)	32.838	24.827
	Produksi (ton)	68.631	51.888
	Produktivitas (kw/ha)	20,91	20,91
Kacang Tanah	Luas Panen (ha)	693	421
	Produksi (ton)	485	295
	Produktivitas (kw/ha)	7,05	7,05
Kacang Hijau	Luas Panen (ha)	159	337
	Produksi (ton)	127	270
	Produktivitas (kw/ha)	8,44	8,44
Ubi Kayu	Luas Panen (ha)	7.479	3.727
	Produksi (ton)	77.706	38.800
	Produktivitas (kw/ha)	103,67	103,67
Ubi Jalar	Luas Panen (ha)	428	344
	Produksi (ton)	3.488	2.789
	Produktivitas (kw/ha)	81,57	81,57

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten TTU, Tahun 2017

Selain sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan juga menjadi unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sub sektor peternakan memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (lihat Tabel 1.5). Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tetap berupaya keras dengan berbagai kebijakan dan program sehingga julukan “Gudang Ternak” di Propinsi Nusa Tenggara Timur bisa tercapai.

**Tabel 1.5.**  
**Perkembangan Populasi Ternak di Kab. TTU**

Ternak	Tahun			Perkembangan (%)
	2015	2016	2017	
Sapi	117.784	120.669	122.921	1,86
Kerbau	720	681	680	-0,14
Kuda	872	995	850	-14,57
Kambing	44.655	47.858	37.492	-21,65
Babi	90.487	81.379	68.609	-15,69
Unggas	172.304	281.030	202.890	-27,80

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten TTU, (data olahan) Tahun 2017

Sub sektor perikanan juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara meskipun wilayah laut Kabupaten Timor Tengah Utara tidak begitu luas yakni kurang lebih 950 km<sup>2</sup> dan hanya terdapat pada Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu di samping pengembangan budidaya perikanan darat.

**Tabel 1.6.**  
**Potensi dan Produksi Perikanan di Kabupaten Timor Tengah Utara**

NO	DESKRIPSI	POTENSI	PRODUKSI					Ket.
			2013	2014	2015	2016	2017	
1.	<b>Perikanan laut</b>							
	a. Luas Perairan Laut (Ha)	900	900	900	900	900	900	
	b. Jumlah tangkapan (ton)	1800	586,54	627,38	628,12	706,87	714,6	
	c. Jumlah kapal penangkap ikan (unit)	100	72	85	85	13	17	
	d. Jumlah rumah tangga perikanan (KK)	-	613	628	630	535	535	
	e. Jumlah tempat pelelangan (unit)	1	1	1	1	-	-	
2.	<b>Perikanan darat</b>							



a.	Luas Tambak Ikan (Ha)	3500	282.4	279.2	279,2	282,6	282,6	
b.	Luas Tambak Garam (Ha)	1097	32	43	43	43	43	
b.	Luas kolam (Ha)	200	25.6	26.8	26,8	28,9	28,9	
c.	Produksi perikanan (ton)	500	178.10	173.7	176,6	166,8	263,4	
d.	Jumlah rumah tangga perikanan (KK)	-	377	383	385	407	407	
e.	BBIS	-	-	-	-	Kewenangan Provinsi	-	
f.	BBI Lokal	1	1	1	1	1	-	

Sumber : Data olahan Dinas Perikanan Kabupaten TTU, Tahun 2017

## 2. Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Kehutanan merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 5 (lima) Huruf D, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Hutan memiliki peranan penting bagi kelestarian alam dan menopang kehidupan komunitas ekosistem alam disekitarnya. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, karena penebangan pohon secara besar-besaran (*illegal logging*), kebakaran hutan, perambahan hutan secara berlebihan dan praktek konservasi lahan secara tradisional yakni perladangan berpindah-pindah.

**Tabel 1.7**  
**Luas Hutan Negara & Kawasan Lindung**  
**(SK Menhut RI No.89/KPTS-II/1983)**

No	Jenis Kawasan	Jumlah	Keterangan
1	Hutan Lindung	40.970	Ha
2	Hutan Produksi Tetap	1.556	Ha
3	Hutan Produksi Terbatas	68.085	Ha
4	Hutan Produksi Dikonversi	13.524	Ha
5	Cagar Alam	2.000	Ha

Sumber : UPT Dinas Kehutanan Kab.TTU

Primadona hasil hutan berupa kayu Cendana baik produksi maupun populasinya kian berkurang belakangan ini. Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang produksinya akan terus anjlok oleh

karena populasinya yang sangat terbatas dan cenderung punah. Hasil hutan lainnya yang cukup menonjol adalah kayu jati bulat, kayu jati persegi, asam biji serta madu.

Pengembangan kehutanan lebih diarahakan untuk kawasan hutan lindung dan sempadan Daerah Aliran Sungai Benenain dengan sub-sub Das yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **3. Pertambangan dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pertambangan dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 5 (lima) Huruf E, urusan pertambangan dan sumber daya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Potensi sumber daya mineral golongan A dan B yang menonjol di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Nikel 2637,0 ppm, Tembaga 20800,5 ppm, Perak 5,5 ppm, dan Emas 20,59 ppm. Sedangkan untuk golongan C batu marmer menyebar di beberapa kecamatan.

Optimalisasi pemanfaatan pertambangan dan sumber daya mineral seringkali tidak berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi. Contoh kongkritnya adalah pertambangan batu mangan yang telah dilakukan sejak 2008 lalu, telah merusak lingkungan bahkan telah memakan korban nyawa karena ketidaksiapan masyarakat menekuni profesi barunya sebagai penambang. Pertambangan batu mangan saat ini telah menjadi primadona masyarakat Kabupaten TTU karena mampu menghasilkan banyak uang dalam hitungan jam. Akan tetapi resiko yang ditimbulkan pun sangat besar, selain kerusakan lingkungan juga taruhan nyawa manusia.

#### 4. Pariwisata

Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi daerah, ruang wilayah dan potensi obyek wisata andalan yang nantinya dapat berperan sebagai *prime mover* dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu melalui penatan ruang yang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berikut dapat disajikan beberapa data terkait potensi pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Utara :

**Tabel 1.8**  
**Tujuan Wisata Kabupaten Timor Tengah Utara**

<b>Nama Objek</b>	<b>Lokasi</b>
<b>Dalam Tahap Pengembangan</b>	
1. Tanjung Bastian	Kelurahan Humusu C (Wini)
2. Perkampungan Adat Tamkesi	Desa Adat Tamkesi kecamatan Biboki Selatan
3. Kolam Renang Oeluan	Desa Bijeli Kecamatan Noemuti
4. Rumah Adat Maslete & Tubuhue	Kelurahan Tubuhue Kecamatan Kota Kefamenanu
5. Bendungan Benkoko	Desa Letmafo Kecamatan Insana Tengah
6. Hutan Wisata Tunbaba Raya	Desa Femnasi Kecamatan Miomaffo Timur
7. Gua Maria Bitauni	Kelurahan Ainiut Kecamatan Insana
8. Sonaf Oelolok	Kelurahan Ainiut Kecamatan Insana
9. Rumah Adat Nilulat	Desa Nilulat Kecamatan Bikomi Nilulat
10. Sonaf Maubesi	Kelurahan Maubesi Kecamatan Insana Tengah
11. Makam Raja Biboki	Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan
12. Sonaf Aplal	Desa Aplal Kecamatan Mutis
13. Sonaf Noetoko	Desa Noetoko Kecamatan Miomaffo Barat
14. Rumah Adat Ten Olla	Kelurahan Salu Kecamatan Miomaffo Barat
15. Rumah Adat Upfaon	Kelurahan Upfaon Kecamatan Biboki Selatan
<b>Dalam Tahap Eksplorasi</b>	
1. Gua Alam Sasi	Kelurahan Oelami Kecamatan Bikomi Selatan
2. Sumber Air Oebikase	Desa Buk Kecamatan Bikomi Tengah
3. Hutan Adat Inbate	Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat

4. Gua Maria Oeperigi	Desa Noebaun Kecamatan Noemuti
5. Sonaf Antonifui	Desa Nonotbatan Kecamatan Biboki Anleu
6. Gua Maria Najjaluu	Kelurahan Upfaon Kecamatan Biboki Selatan
7. Gua Suti	Desa Bijaepasu Kecamatan Miomaffo Tengah
8. Air Terjun Pah Koto	Desa Tasinifu Kecamatan Mutis
9. Kolam Oeroni	Desa Nonotbatan Kecamatan Biboki Anleu
10. Sonaf Naktimun	Desa Oetulu Kecamatan Musi
11. Cagar Alam Mutis Babnain	Kecamatan Miomaffo Barat
12. Cagar Alam Mutis Timau	Kecamatan Mutis
13. Mumi Tola	Desa Naekake A Kecamatan Mutis
14. Pekuburan Sonbay	Kelurahan Noemuti Kecamatan Noemuti
15. Sumur St. Fransiskus Xaverius	Kelurahan Noemuti Kecamatan Noemuti
16. Pantai Wisata Oebubun	Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu
17. Pantai Wisata Batu Putih	Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.TTU

**Tabel 1.9**  
**Event Budaya Tahunan**

No	Nama Kegiatan	Lokasi
1.	Upacara <i>Tuet Ulan</i> (Minta Hujan)	Rumah Adat Maslete Kelurahan Tubuhue
2.	Upacara <i>Tama Maus</i> (penyerahan Upeti)	Rumah Adat Maslete Kelurahan Tubuhue
3.	Upacara <i>Tnon Pah</i> (mengelilingi wilayah Bikomi yang dilaksanakan sekali dalam 7 Tahun)	Rumah Adat Maslete Kelurahan Tubuhue
4.	Karnaval Budaya	Kefamenanu
5.	Napak Tilas Sejarah terbentuknya Kefemenanu	Noetoko – kefamenanu
6.	Prosesi Kure (berkeliling sambil berdoa di Rumah Adat pada saat Paskah)	Desa Noemuti-Kecamatan Noemuti

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.TTU Tahun 2017

Berdasarkan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten TTU, maka potensi pariwisata perlu didorong dengan mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk menarik kunjungan wisata ke wilayah Kabupaten TTU sebagai suatu daya

tarik khusus yang berbeda dari daerah lain seperti peningkatan obyek wisata alam dan religius/budaya seperti Prosesi Kure di Noemuti, potensi cagar alam Mutis, cagar budaya Oelolok dan Tamkesi serta atraksi jenis tarian budaya maupun wilayah cagar alam laut sawu yang ada di wilayah Kabupaten TTU.

#### D. PERTUMBUHAN EKONOMI

##### 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan dan peningkatan kemampuan ekonomi menjadi hal yang tidak terpisahkan, keberhasilan pembangunan yang paling umum diketahui dan diakui adalah kemajuan tingkat ekonomi yang dicapai di daerah tersebut. Kabupaten Timor Tengah Utara dengan berbagai potensi pembangunan dan program kegiatan, inisiatif dan kerjasama antar pelaku pembangunan menghasilkan kondisi perekonomian yang terus meningkat, yang mana dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 1.10**  
**PDRB Per Kapita Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**di Kabupaten Timor Tengah Utara**

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	240.687	243.984	246.685
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) berdasarkan sensus penduduk 2000-2010	1,72		
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,89	65,89	66,09
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,03	13,24	13,26
Rata-rata pengeluaran per kapita (Rp/bln)	*	201.766	630,783
<b>PDRB-Konstan (Rp Juta)</b>	561,140	586.693,47	2.379.000,-
<b>PDRB-Berlaku (Rp Juta)</b>	1.277.858,47	1.420.366,42	2.935.000,-
<b>Pendapatan Perkapita (Rp)</b>	5.102.264	5.567.626	999.642/bulan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,55	4,52
IPM	68,94	60,41	60,96
<b>Rasio Beban Tanggungan</b>		68,61	68,61
<b>Inflasi</b>	2,84	9,48	7,04
<b>(%) pengangguran</b>	1,62	2,87	2,20
<b>PAD (Rp)</b>	<b>17.987.044.000,00</b>	<b>32.029.110.641,22</b>	<b>36.136.381.127,80</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. TTU

Keterangan : data PDRB tahun 2016 dan 2017 sampai dengan penyusunan LKjIP ini selesai masih dalam proses penyusunan di BPS Kab. TTU

Tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten TTU ditunjukkan oleh beberapa indikator, salah satunya adalah pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB mengalami perkembangan yang cukup baik meski trendnya fluktuatif. (lihat tabel 1.11).

**Tabel 1.11.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2014 – 2016**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	3,50	3,9	3,14
2	Pertambangan & Penggalian	5,82	3,44	4,37
3	Industri Pengolahan	5,34	3,53	5,83
4	Pengadaan Listrik & Gas	16,54	11,52	11,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah & Daur ulang	2,44	2,47	2,48
6	Bangunan	4,37	4,46	4,47
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,23	7,46	8,02
8	Transportasi & Pergudangan	6,33	6,36	6,44
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,76	5,81	5,83
10	Informasi & Komunikasi	4,38	4,39	4,41
11	Jasa Keuangan & Asuransi	6,86	4,95	7,90
12	Real Estate	4,19	4,43	4,28
13	Jasa Perusahaan	5,70	5,07	5,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6,93	8,72	9,10
15	Jasa Pendidikan	4,58	4,87	5,70
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,59	2,78	3,80
17	Jasa Lainnya	0,08	0,10	0,30

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber : TTU Dalam Angka 2017

**Tabel 1.12**  
**Pendapatan Per Kapita Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi**  
**di Kabupaten TTU dan Provinsi NTT, Tahun 2012-2016**

Tahun	Kabupaten TTU		Provinsi NTT	
	Pendapatan Per kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pendapatan Per kapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	4.701.140	4,42	6.726.650	5,41
2013	5.102.200	4,40	12.379.020	5,56
2014	5.567.626	4,43	13.619.198	5,05
2015	12.154.867	4,70	14.928.040	5,02
2016	12.380.782	4,87	*	*

Sumber : TTU Dalam Angka 2017

PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 2.678.716,40 pada tahun 2015 menjadi Rp. 2.935.516,36 pada tahun 2016. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan meningkat yaitu dari Rp. Rp. 2.276.628,83 pada tahun 2015 menjadi Rp. 2.379.635,77 pada tahun 2016. Hal ini berarti secara riil perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Peran masing-masing sektor ekonomi tentunya mempengaruhi percepatan perekonomian daerah dan oleh karenanya dibutuhkan prakarsa pengembangan potensi setiap sektor untuk didorong menjadi unggulan daerah. Melalui identifikasi sektor unggulan, perencanaan kegiatan ekonomi diprioritaskan pada sektor yang menjadi spesialisasi daerah dan berimplikasi lebih luas bagi perekonomian daerah.

## **2. Laju Inflasi**

Gejala meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dikenal dengan istilah inflasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang import yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) per bulan di Kota Kefamenanu terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa, antara lain: 2,84% pada tahun 2013, meningkat menjadi 9,48% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 laju inflasi umum menurun

menjadi 7,04% dan 4,65% pada tahun 2016. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada kelompok komoditas makanan yaitu sebesar 12,57%, kemudian diikuti oleh komoditas makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,31% dan paling kecil adalah kelompok komoditas kesehatan sebesar -0,86%.

Rata-rata indeks laju inflasi harga bahan pokok di Kota Kefamenanu tahun 2013 adalah sebesar 2,84%, sementara inflasi umum pada tahun 2014 mencapai 9,48%, dan menurun sebesar 6,10% pada tahun 2015. Secara parsial pada tahun 2015 tingkat inflasi tertinggi terjadi pada komoditi beras sebesar 9%, lalu diikuti semen pada 4,48% dan minyak goreng 3,54%.

**Tabel 1.13**  
**Laju Inflasi Untuk Tujuh Kelompok Komoditas Barang dan Jasa**  
**di Kota Kefamenanu Tahun 2012 – 2016**

No	Kelompok Komoditas	Laju inflasi kelompok komoditas per tahun (%)			
		2013	2014	2015	2016
1	Makanan	3,66	7,18	12,26	12,57
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	3,32	8,60	10,36	7,31
3	Perumahan	0,43	6,15	2,77	1,42
4	Sandang	2,43	2,67	4,66	1,30
5	Kesehatan	3,26	3,15	3,97	-0,86
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,24	4,67	5,55	3,53
7	Transportasi dan Komunikasi	6,14	26,99	2,38	2,00
Laju Inflasi Umum (%)		2,84	9,48	7,04	4,65

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. TTU 2017*

Tingkat inflasi tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Utara pernah terjadi pada tahun 1998 sebesar 114,29 % sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai momentumnya pada tahun tersebut. Pada tahun-tahun setelah itu tingkat laju inflasi berjalan fluktuatif karena manajemen perekonomian nasional masih ditandai dengan kebijakan kenaikan harga berbagai barang dan jasa strategis akibat



berkurangnya anggaran subsidi dalam APBN. Barang strategis seperti listrik, minyak tanah, bensin, solar dan tarif telepon yang terus mengalami penyesuaian harga pada gilirannya akan menaikkan harga berbagai kebutuhan pokok karena barang-barang strategis tersebut mempunyai kaitan langsung dengan sektor produksi dan distribusi. Laju inflasi di Kabupaten TTU pada tahun 2016 mencapai sekitar 4,65 %. Hal ini terjadi akibat dari kebijakan pemerintah memberlakukan harga tunggal BBM serta upaya stabilisasi harga beberapa komoditas sembako sehingga memicu naiknya harga berbagai barang kebutuhan masyarakat lainnya.

#### **E. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Organisasi Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan menghasilkan beberapa Peraturan Daerah antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Besaran organisasi perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.14**  
**Besaran Organisasi Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL			KET.
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	4	9	27	
2	Staf Ahli	3	-	-	
3	Sekretariat DPRD	1	4	12	
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1	5	18	Ditambah 9 Jabatan pada UPTD
5	Dinas Kesehatan	1	5	43	Ditambah 28 Jabatan pada UPTD
6	Dinnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	5	15	
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	4	11	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1	5	15	
9	Dinas Sosial	1	4	11	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	4	13	Ditambah 2 Jabatan UPTD
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	3	8	
12	Dinas Ketahanan Pangan	1	5	15	
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	29	Ditambah 18 Jabatan pada UPTD
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5	15	
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3	8	
16	Dinas Perhubungan	1	4	11	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	3	8	
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	4	11	
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	5	17	Ditambah 2 Jabatan Pada UPTD
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	5	17	
21	Dinas Perikanan	1	3	10	Ditambah 2 Jabatan Pada UPTD
22	Dinas Pertanian	1	4	11	

NO	URAIAN	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL			KET.
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	
1	2	3	4	5	6
23	Dinas Peternakan	1	4	13	Ditambah 2 Jabatan pada UPTD
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	4	11	
25	Dinas Lingkungan Hidup	1	5	15	
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	5	15	
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	5	15	
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	5	15	
29	Badan Pendapatan	1	5	15	
30	Badan Keuangan dan Aset	1	5	15	
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	5	11	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	5	9	
	Inspektorat	1	5	15	
32	Rumah Sakit Umum Daerah		4	7	
33	Sekretariat Korpri		1	3	
34	Kecamatan		48	168	
35	Kelurahan			55	
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>199</b>	<b>707</b>	

*Data Olahan Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Desember 2017)*

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, jumlah pegawai negeri sipil secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 5.473 orang dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel 1.15.

**Tabel 1.15**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017**

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
	- Sekretaris Daerah	1 orang	
	- Asisten Tata Praja	1 orang	
	- Asisten Ekonomi Pembangunan	1 orang	
	- Asisten Administrasi dan Keuangan	1 orang	
	- Bagian Tata Pemerintahan	13 orang	
	- Bagian Hukum	11 orang	
	- Bagian Humas dan Protokol	14 orang	
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10 orang	
	- Bagian Ekonomi	11 orang	
	- Bagian Sosial	12 orang	
	- Bagian Organisasi dan Tata Laksana	11 orang	
	- Bagian Umum	46 orang	
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	26 orang	
<b>3</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	54 orang	
<b>3</b>	<b>Dinas daerah</b>		
	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.649 orang	
	- Dinas Kesehatan	772 orang	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95 orang	
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	47 orang	
	- Satuan Polisi Pamong Praja	53 orang	
	- Dinas Sosial	28 orang	
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19 orang	
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 orang	
	- Dinas Pangan	30 orang	
	- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31 orang	
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	34 orang	
	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52 orang	
	- Dinas Perhubungan	40 orang	
	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26 orang	

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Ket
1	2	3	4
	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	33 orang	
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	34 orang	
	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38 orang	
	- Dinas Perikanan	45 orang	
	- Dinas Pertanian	153 orang	
	- Dinas Peternakan	70 orang	
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24 orang	
	- Dinas Lingkungan Hidup	23 orang	
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30 orang	
<b>4</b>	<b>Badan, Kantor, RSUD dan LTD lainnya</b>		
	- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	41 orang	
	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	32 orang	
	- Badan Pendapatan	54 orang	
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26 orang	
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	16 orang	
	- Badan Keuangan dan Aset	38 orang	
	- Badan KESBANGPOL	31 orang	
	- Sekretariat Korpri Kabupaten TTU	8 orang	
	- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	207 orang	
<b>4</b>	<b>Kecamatan &amp; Kelurahan</b>		
	- Miomaffo Barat	16 orang	
	- Miomaffo Tengah	19 orang	
	- Musi	17 orang	
	- Mutis	16 orang	
	- Miomaffo Timur	18 orang	
	- Noemuti	14 orang	
	- Bikomi Selatan	16 orang	
	- Bikomi Tengah	14 orang	
	- Bikomi Nilulat	11 orang	
	- Bikomi Utara	14 orang	
	- Naibenu	15 orang	
	- Noemuti Timur	12 orang	
	- Kota Kefamenanu	104 orang	
	- Insana	20 orang	

No.	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Ket
1	2	3	4
	- Insana Utara	18 orang	
	- Insana Barat	17 orang	
	- Biboki Tanpah	15 orang	
	- Insana Tengah	14 orang	
	- Insana Fafinesu	12 orang	
	- Biboki Selatan	16 orang	
	- Biboki Utara	19 orang	
	- Biboki Moenleu	12 orang	
	- Biboki Feotleu	19 orang	
	- Biboki Anleu	19 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>5473 orang</b>	



**A. RENCANA STRATEGIK**

Rencana strategik merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain serta potensi lainnya dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang agar mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di daerah, nasional maupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasarannya selama kurun waktu tertentu dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategik Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 sebagai suatu bentuk penjabaran lebih lanjut dan rinci dari program pembangunan daerah yang juga memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan pembangunan daerah serta indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian tugas Kepala Daerah.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan, serta Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yakni periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Visi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA LESTARI”.**

Kandungan makna dalam uraian visi ini menjelaskan bahwa kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpenghasilan cukup, cerdas dan sehat, memiliki kesamaan hak dalam hukum dan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam nuansa demokrasi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang baik laki-laki maupun perempuan sehingga memungkinkan rakyat untuk hidup mandiri. Berikut dijelaskan makna kata-kata kunci dari visi tersebut.

**“Sejahtera”** mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

**“Adil”** memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

**“Demokratis”** mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

**“Mandiri”** menunjukkan kondisi dimana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

**“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam”** mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

**“Secara lestari”** menggambarkan pembangunan yang berkelanjutan dimana eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan sumber daya bagi generasi selanjutnya.

## **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pada Visi Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah diuraikan di atas, maka misi yang diemban antara lain :

**MISI I** : Memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan.

**MISI II** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses.

**MISI III** : Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah.

**MISI IV** : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

**MISI V** : Mengembangkan kawasan strateggis daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan kawasan pesisir, kawasan perbatasan serta memberdayakan masyarakat desa tertinggal.

Dari kelima misi itu didukung oleh tujuan dan setiap tujuan didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut :

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

#### **1) Misi I**

Didukung dengan 9 (sembilan) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya jumlah rumah layak huni.
- b. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian unggulan. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya produksi produk pertanian unggulan kabupaten.
  2. Meningkatnya produktivitas dan produksi peternakan di Kabupaten TTU.
  3. Meningkatnya hasil produksi kelautan dan perikanan.

- c. Meningkatnya kompetensi daya saing Koperasi, UKM dan IKM. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya kompetensi Koperasi, UKM dan IKM.
- d. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Memperkuat lembaga ekonomi masyarakat.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Tersedianya pangan utama.
- f. Mendorong pengembangan pariwisata daerah. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya daya tarik wisata
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
  - 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan penghijauan.
  - 2. Tersedianya sumber air minum bagi masyarakat.
  - 3. Terkendalinya tingkat pencemaran
- h. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya realisasi investasi.
- i. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja produktif.

## 2) Misi II

Didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
  - 1. Meningkatnya aksesstabilitas dan pemerataan pendidikan.
  - 2. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan layanan perpustakaan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  - 1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB.
- d. Meningkatkan pelayanan sosial dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- e. Mengembangkan kebudayaan dan peningkatan kegiatan kepemudaan dan olahraga. Didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu :
  1. Lestarnya nilai-nilai budaya.
  2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga.

### **3) Misi III**

Didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan aksestabilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Didukung dengan 4 (empat) sasaran yaitu :
  1. Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
  2. Terkendalinya pemanfaatan ruang .
  3. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih.
  4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.

### **4) Misi IV**

Didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Didukung dengan 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
  2. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Meningkatnya budaya taat hukum.
  4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
  5. Meningkatnya pemanfaatan media dan teknologi.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
1. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan daerah.
  2. Tersedianya data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.
  3. Terlaksananya kerjasama pembangunan.
- c. Memperkuat kemampuan manajemen pemerintahan desa. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

## **5) Misi V**

Didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu :

- a. Mengembangkan Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PKSN. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PKSN.
- b. Mengembangkan kawasan pesisir pantura. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Berkembangnya kawasan pesisir Pantura.
- c. Meningkatkan pembangunan kawasan Perbatasan. Didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu : Berkembangnya kawasan perbatasan.

## 2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten TTU 5 (lima) tahun mendatang, maka pemerintah akan melaksanakan 5 (lima) misi yang ditempuh melalui 34 (tiga puluh empat) strategi pembangunan daerah diantaranya :

### a. Misi I

**“Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan hidup secara sinergitas dan berkelanjutan”**

Strategi	Arah Kebijakan
Pengentasan Kemiskinan terutama penduduk dengan rumah tidak layak huni	BEdeah RuMAh Rakyat Tidak layak huni (BERARTI) berupa stimulan pembangunan rumah dan dilaksanakan dalam semangat gotong royong dengan target tuntas desa
Mengembangkan Pertanian secara terpadu melalui optimalisasi potensi pertanian	1. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian unggulan daerah; 2. Pengembangan Agribisnis; 3. Pengembangan produksi peternakan dan perikanan; 4. Pengembangan <i>breeding center</i> ternak sapi bali
Optimalisasi dan peningkatan kompetensi serta daya saing usaha Koperasi, UKM dan IKM	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, UKM dan IKM; 2. Peningkatan akses teknologi, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi, UKM dan IKM.
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa	1. Pembentukan dan pembinaan Koperasi Desa; 2. Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani.

Strategi	Arah Kebijakan
Menjaga ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan dan penguatan penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan daerah rawan pangan;</li> <li>2. Penyediaan cadangan pangan daerah;</li> <li>3. Meningkatkan pendampingan dan penyuluhan kelompok tani.</li> </ol>
Pemasaran pariwisata, penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kemitraan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan even kreatif serta optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing;</li> <li>2. Penataan dan pengembangan obyek wisata.</li> </ol>
Mendorong pengelolaan sampah dan limbah secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang dengan teknologi yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan limbah;</li> <li>2. Pengembangan system daur ulang sampah.</li> </ol>
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reboisasi/Penghijauan;</li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.</li> </ol>
Memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Pelestarian sumber-sumber air baku untuk air minum.
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara stakeholder penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>2. Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perizinan.</li> </ol>
Perluasan kesempatan kerja yang didukung dengan peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki database tenaga kerja produktif;</li> <li>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja;</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja terutama dalam sektor pertanian.</li> </ol>



b. Misi II

**“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses”**

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan PAUD;</li> <li>2. Pengembangan Pendidikan Dasar 9 tahun;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>4. Pemerataan tenaga pendidik;</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>6. Fasilitasi beasiswa pendidikan dan biaya penelitian.</li> </ol>
Peningkatan minat baca masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah;</li> <li>2. Memfasilitasi terbentuknya perpustakaan desa.</li> </ol>
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, pengendalian penyakit manular dan tidak menular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan UPT Puskesmas, Pustu dan Polindes;</li> <li>2. Meningkatkan penataan system rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin;</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana, manajemen rrumah sakit, ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan para medis, peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pemdidikan formal dan diklat;</li> <li>4. Memberikan beasiswa ikatan dinas kepada lulusan SMA berprestasi mengikuti pendidikan kedokteran</li> </ol>
Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melauai kampanye hidup sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan desa siaga dan aktif;</li> <li>2. Meningkatkan promosi kesehatan;</li> <li>3. Meningkatkan STBM.</li> </ol>
Pemberdayaan keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan CPR/Koperasi aktif;</li> <li>2. Penyebarluasan informasi KB;</li> <li>3. Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan.</li> </ol>

Strategi	Arah Kebijakan
Memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;</li> <li>3. Peningkatan penanganan bencana.</li> </ol>
Pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban kekerasan;</li> <li>2. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak.</li> </ol>
Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah.	Penyelenggaraan festival budaya daerah.
Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan;</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;</li> <li>3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga;</li> <li>4. Fasilitasi atlet berprestasi dan klub olahraga.</li> </ol>

c. Misi III

**“meningkatkan aksestabilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah”**

Strategi	Arah Kebijakan
Pencepatan pembangunan infrastruktur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;</li> <li>2. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;</li> <li>3. Pembangunan dan pemeliharaan embung/cekdam;</li> <li>4. Pengamanan kali/tebing untuk</li> </ol>

Strategi	Arah Kebijakan
	pengamanan jalan, areal persawahan dan situs budaya; 5. Normalisasi sungai.
Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	1. Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada rencana tata ruang; 2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Penyediaan sarana dan prasarana air bersih.	1. Peningkatan pelayanan air minum; 2. Perluasan jaringan air bersih.
Penyediaan sarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2. Penyediaan fasilitas terminal yang layak; 3. Meningkatkan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor; 4. Penataan angkutan umum.

d. Misi IV

**“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih”**

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan asset daerah dan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh aparatur professional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.	1. Penataan struktur organisasi yang proporsional; 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas; 3. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan; 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur; 6. Peningkatan kinerja dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan; 8. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang mendukung kinerja

Strategi	Arah Kebijakan
	penyelenggaraan pemerintahan daerah; 9. Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas.
Meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peningkatan sistem pengawasan intern penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum.	1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; 2. Peningkatan penyelarasan peraturan daerah; 3. Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lain; 4. Pengakan Peraturan Daerah; 5. Peningkatan kesadaran hukum ( <i>legal consciousness</i> ) dan kepatuhan hukum ( <i>legal compliance</i> ) aparatur birokrasi dan masyarakat.
Peningkatan kualifikasi aparatur.	1. Pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada aparatur; 2. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	1. Membuka layanan jaringan media partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik yang terakses; 2. Pelayanan jaringan teknologi informasi di area publik khususnya dalam kota kefamenanu; 3. Membanngun kerjasama dengan media dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif; 3. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan integrasi/konektivitas data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penggunaan SIMPEDDA;</li> <li>2. Penyediaan data dan profil daerah berbasis GIS.</li> </ol>
Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah.	Membangun kerjasama kemitraan strategis lintas kota ( <i>sister city</i> ), pemerintahan pusat dan Kabupaten/Kota serta NGO/LSM dalam bidang ekonomi, sosial, infrastruktur dan pemerintahan.
AMASAT (penguatAn MANajemen pemerintahan deSA Tertinggal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;</li> <li>2. Peningkatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.</li> </ol>

d. Misi V

**“Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan kawasan pesisir dan kawasan perbatasan serta memberdayakan masyarakat desa tertinggal”**

Strategi	Arah Kebijakan
Koordinasi dan kerjasama dalam penataan dan pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PKSN, kawasan Pesisir Pantai Utara dan Kawasan Perbatasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Rumah Layak Huni dalam Kota;</li> <li>2. Penyediaan air bersih dalam kota;</li> <li>3. Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU);</li> <li>4. Penyediaan dan pemeliharaan ruang publik bagi masyarakat dalam kota;</li> <li>5. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase dan saluran / drainase dan gorng-gorong;</li> <li>6. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan;</li> <li>7. Pengendalian kualitas lingkungan dan pengelolaan persampahan serta instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);</li> <li>8. Pembangunan Taman Doa (Pembangunan Patung Kristus Raja);</li> <li>9. Penyelenggaraan festival seni dan</li> </ol>

Strategi	Arah Kebijakan
	budaya; 10. Penyelenggaraan kompetisi olahraga; 11. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; 12. Penyusunan RDTRK Kefamenanu; 13. Pengembangan pelabuhan Wini; 14. <i>Review grand design</i> Kota Terpadu Mandiri Ponu; 15. Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir; 16. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; 17. Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan; 18. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan kawasan perbatasan.

### 3. Program Pembangunan Daerah

Berangkat dari rumusan kebijakan umum, kemudian ditetapkan program pembangunan daerah yang menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 – 2021 ditetapkan berdasarkan potensi daerah, yaitu sebagai berikut :

#### A. Misi I

“Memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan”.

#### a. Agenda Pembangunan

Agenda Utama : Pengembangan pertanian dan pengembangan koperasi dan UMKM.

Agenda Khusus : Penguatan Otonomi Desa.

Agenda Penunjang : Pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata, peningkatan investasi daerah dan pembinaan ketenagakerjaan.

b. Program Pengembangan Daerah

Urusan	Program
Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan produksi pertanian;</li> <li>2. Program peningkatan produksi hasil peternakan;</li> <li>3. Program peningkatan kesejahteraan petani;</li> <li>4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;</li> <li>5. Program penerapan teknologi peternakan;</li> <li>6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;</li> <li>7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;</li> <li>8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;</li> <li>9. Program pengembangan budidaya peternakan;</li> <li>10. Program pengembangan perikanan tangkap;</li> <li>11. Program pemberdayaan masyarakat pesisir;</li> <li>12. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;</li> <li>13. Program pengembangan kawasan laut, air payau dan air tawar.</li> </ol>
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan ketahanan pangan;</li> <li>2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian.</li> </ol>
Perindustrian, perdagangan dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;</li> <li>2. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif;</li> <li>3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;</li> </ol>

Urusan	Program
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah;</li> <li>5. Program peningkatan efisiensi dan perdagangan dalam negeri;</li> <li>6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;</li> <li>7. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;</li> <li>8. Program pengembangan industri kecil dan menengah;</li> <li>9. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;</li> <li>10. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.</li> </ol>
Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan destinasi pariwisata;</li> <li>2. Program pengembangan pemasaran pariwisata;</li> <li>3. Program pengembangan kemitraan.</li> </ol>
Ketenagakerjaan dan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;</li> <li>2. Program peningkatan kesempatan kerja;</li> <li>3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;</li> <li>4. Program pengembangan wilayah transmigrasi.</li> </ol>
Penanaman modal/ investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;</li> <li>2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;</li> <li>3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah</li> </ol>
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa
Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan perumahan;</li> <li>2. Program pengembangan lingkungan sehat perumahan;</li> </ol>



Urusan	Program
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;</li> <li>2. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;</li> <li>3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;</li> <li>4. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.</li> </ol>

## B. Misi II

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses”.

### a. Agenda Pembangunan

Agenda Strategis : Pengembangan pendidikan dan pengembangan kesehatan.

Agenda Penunjang : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengembangan olahraga dan kepemudaan, pembinaan kesejahteraan sosial dan transmigrasi

### b. Program Pembangunan

Urusan	Program
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pendidikan anak usia dini;</li> <li>2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;</li> <li>3. Program pendidikan non formal;</li> <li>4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>5. Program manajemen pelayanan pendidikan;</li> <li>6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.</li> </ol>
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program obat dan perbekalan;</li> <li>2. Program upaya kesehatan masyarakat;</li> <li>3. Program pengawasan obat dan makanan;</li> <li>4. Program promosi kegiatan dan</li> </ol>

Urusan	Program
	<p>pemberdayaan masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program perbaikan gizi masyarakat;</li> <li>6. Program pengembangan lingkungan sehat;</li> <li>7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;</li> <li>8. Program standarisasi pelayanan kesehatan;</li> <li>9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;</li> <li>10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaaringannya;</li> <li>11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;</li> <li>12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;</li> <li>13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;</li> <li>14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;</li> <li>15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;</li> <li>16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;</li> <li>17. Program pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium.</li> </ol>
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;</li> <li>2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;</li> <li>3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;</li> <li>4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.</li> </ol>
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program keluarga berencana;</li> <li>2. Program kesehatan reproduksi remaja;</li> <li>3. Program pelayanan kontrasepsi;</li> <li>4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ kesehatan reproduksi yang mandiri;</li> <li>5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan</li> </ol>

Urusan	Program
	<p>anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja;</li> <li>7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;</li> <li>8. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-Padu.</li> </ol>
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;</li> <li>2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Program pembinaan anak terlantar;</li> <li>4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;</li> <li>5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, tuna susila, narkoba, dan penyakit sosial lainnya);</li> <li>6. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;</li> <li>7. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</li> <li>8. Program kedaruratan dan logistik;</li> <li>9. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana.</li> </ol>
Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan kekayaan budaya;</li> <li>2. Program pengelolaan keragaman budaya.</li> </ol>
Pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan peran serta kepemudaan;</li> <li>2. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;</li> <li>3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;</li> <li>4. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.</li> </ol>

### C. Misi III

“Meningkatkan Aksestabilitas melalui Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah”.

#### a. Agenda Pembangunan

Agenda Penunjang : Peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah.

Agenda khusus : Pengembangan Kota Kefamenanu sebagai *Ume Naek Ume Mese* dan PKSN, kawasan pesisir Pantai Utaradan pengembangan kawasan perbatasan.

#### b. Program Pembangunan

Urusan	Program
Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program pembangunan jalan dan jembatan;</li><li>2. Program pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong;</li><li>3. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;</li><li>4. Program pembangunan sistem informasi/ database jalan dan jembatan;</li><li>5. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;</li><li>6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;</li><li>7. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya;</li><li>8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;</li><li>9. Program pengembangan infrastruktur perkotaan.</li></ol>
Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program perencanaan Tata Ruang;</li><li>2. Program pemanfaatan ruang;</li><li>3. Program pengendalian pemanfaatan ruang;</li></ol>
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;</li><li>2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan</li></ol>

Urusan	Program
	prasarana dan fasilitas LLAJ; 3. Program peningkatan pelayanan angkutan; 4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; 5. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

#### D. Misi IV

“Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik dan bersih”.

##### a. Agenda Pembangunan

Agenda Penunjang : Penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah, pemantapan kualitas layanan administrasi pemerintah daerah, penguatan pengelolaan database, kearsipan dan informatika.

Agenda khusus : Penguatan Otonomi Desa

##### b. Program Pembangunan

Urusan	Program
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Perangkat daerah.	1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah; 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Urusan	Program
	pengawasan; 7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 8. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 9. Program penataan peraturan Perundang-Undangan; 10. Program fasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah; 11. Program pengembangan sumber daya penerimaan daerah.
Kepegawaian.	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
Pemerintahan Desa.	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 4. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
Statistik	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Kearsipan	1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah; 3. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan; 4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
Komunikasi dan Informatika	1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 2. Program kerjasama informasi dengan mass media.
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

Urusan	Program
	2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan; 4. 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); 6. Program pendidikan politik bagi masyarakat.
Kependudukan dan pencatatan sipil.	Program penataan administrasi kependudukan
Perencanaan pembangunan daerah	1. Program pengembangan data dan informasi; 2. Program perencanaan pembangunan daerah; 3. Program kerjasama pembangunan; 4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 5. Program perencanaan bidang ekonomi; 6. Program perencanaan sosial dan budaya; 7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

#### E. Misi V

“Mengembangkan Kawasan Strategis Daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan Kawasan Pesisir, Kawasan Perbatasan serta memberdayakan Masyarakat Desa Tertinggal”.

Misi ini merupakan agenda khusus yang membutuhkan sinergi program dari beberapa urusan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai arah kebijakan pembangunan daerah yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Misi ini dilaksanakan secara terpadu oleh beberapa SKPD dengan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Program – program pembangunan untuk misi ini adalah :

- a. Program pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
- b. Program pengembangan wilayah perbatasan;
- c. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perlu disadari dokumen yang dibuat masih sangat jauh dari kesempurnaan karena penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja cenderung disusun berdasarkan rekapan dari program / kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lebih menggambarkan pencapaian indikator kinerja *output* sehingga mengakibatkan pelaporan LKjIP menampilkan kinerja *output* pula.

Menyikapi hal dimaksud maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 – 2021 yang indikator sarannya disesuaikan dengan



indikator kinerja pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021.

Berikut perjanjian kinerja pembangunan daerah yang menjadi instrumen pengukuran pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
1.	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	1.	Jumlah Rumah Layak Huni	31.876 unit
2.	Meningkatnya Produksi Produk Pertanian Unggulan Kabupaten	1.	Produksi Jagung	76.767 ton
		2.	Produksi Kacang Tanah	6.416 ton
		3.	Produksi Bawang Putih Lokal	77 ton
		4.	Produksi Padi	49.895 ton
		5.	Cakupan Bina Kelompok Tani	100 %
3.	Meningkatnya Produkivitas dan Produksi Peternakan di Kabupaten TTU	1.	Jumlah ternak hasil IB	250 ekor
		2.	Jumlah Populasi Ternak Sapi Bali	117.789 ekor
		3.	Luas Areal HMT per Kelompok Tani	1 ha
		4.	Angka Kematian Ternak	9 %
4.	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	1.	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Terbantu	74 %
		2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	158 ton
5.	Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	1.	Jumlah Koperasi Aktif	59 unit
		2.	Jumlah UKM terbina	166 unit
		3.	Jumlah IKM terbina	398 unit
6.	Menguatnya lembaga ekonomi masyarakat	1.	Jumlab BUMDes terbentuk	5 unit
		2.	Jumlah Kelompok Tani Terbina	1.176 kelompok
		3.	Jumlah Koperasi Desa Terbentuk	5 koperasi
7.	Tersedianya Pangan Utama	1.	Jumlah Desa Rawan Pangan Tertangani	70 Desa
		2.	Tersedianya Lumbung Pangan Desa	20 unit
		3.	Ketersediaan Pangan Utama	52,30 %
8.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	46.844 orang
9.	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan penghijauan	1.	Luas Lahan Kritis Yang Direboisasi	30 Ha
10.	Tersedianya Sumber Air Minum Bagi Masyarakat	1.	Jumlah Mata Air Yang Terpelihara	482 Unit
11.	Terkendalinya Tingkat Pencemaran	1.	Status Mutu Air Teruji	10 %

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
12.	Meningkatnya realisasi investasi	1.	Jumlah investor (PMA/PMDN)	26 investor
		2.	Nilai Investasi	102,40 milyar
13.	Meningkatnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja produktif	1.	Jumlah tenaga kerja terlatih	50 Orang
		2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70 %
		3.	Ratio Ketergantungan	73,25 %
14.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan	1.	APM PAUD	43,97 %
		2.	APM SD	98,5 %
		3.	APM SMP	88 %
		4.	Angka Melek Huruf	94 %
		5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,19 Tahun
		6.	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	83,12 %
		7.	Sekolah SMP/MTS kondisi bangunan baik	60,74 %
		8.	Angka kelulusan SD/MI	99,40 %
		9.	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,98 %
		10.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	86,12 %
		11.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	86,12 %
		12.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,65 %
15.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dan layanan perpustakaan	1.	Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten per tahun	19.000 orang
		2.	Jumlah Desa Yang Memiliki Perpustakaan	96 desa
		3.	Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan	24.923 judul
		4.	Jumlah Buku Yang tersedia di Perpustakaan	96.245 exemplar
16.	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah	1.	Ratio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000)	0,17
		2.	Ratio posyandu persatuan balita (per 1000)	20,83
		3.	Ratio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000)	1,00
		4.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	94,94 %
		5.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	30,97 %
		6.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	60,00 %
17.	Meningkatnya status	1.	AKI (per 100.000 KH)	192,95

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
kesehatan dan gizi masyarakat	2.	AKB (per 1000)	23	
	3.	Gizi Buruk	0,39 %	
	4.	Ratio ketersediaan obat	96,92 %	
	5.	Angka Harapan Hidup	65,90 tahun	
	6.	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	72,90 %	
	7.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	84,25 %	
	8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,41 %	
	9.	Cakupan pelayanan nifas	83,21 %	
	10.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	78,72 %	
	11.	Cakupan kunjungan bayi	89,46 %	
	12.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	66,55 %	
	13.	Cakupan pelayanan Balita	63,39 %	
	14.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	29,53 %	
	15.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	
	16.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	96,37 %	
	17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	47,96 %	
	18.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %	
	19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	77,56 %	
	20.	Cakupan desa siaga aktif	70,70 %	
	18.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB	1.	Cakupan Peserta KB Aktif
19.	Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.	Jumlah PMKS yang dibantu	75 %
20.	Meningkatnya perlidungan terhadap perempuan dan anak	1.	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga	8 kasus
21.	Lestarnya nilai-nilai budaya	1.	Jumlah festival budaya yang diselenggarakan	4 kali

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
		2.	Jumlah grup kesenian	98 grup
22.	Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga	1.	Jumlah organisasi kepemudaan terbina	2 organisasi
		2.	Jumlah club olahraga yang dibantu	1 club
		3.	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan	1 kali
23.	Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi	1.	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi	379,29 km
		2.	Jumlah jembatan yang dibangun	112 unit
		3.	Panjang saluran irigasi terbangun	37.975,22 ha
24.	Terkendalnya pemanfaatan ruang	1.	Jumlah dokumen tataruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah	2 perda
		2.	Ketataan terhadap RTRW	50 %
25.	Tersedianya sarana prasarana air bersih	1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	83,65 %
26.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	1.	Kepemilikan KIR angkutan umum	30,44 %
27.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	SKPD yang menyusun Renja tepat waktu	50 %
		2.	Penduduk ber -e-KTP	70 %
		3.	Ratio penduduk berakta kelahiran	28,84 %
		4.	Ratio pasangan berakta nikah	51,38 %
		5.	SKPD dengan pelaporan keuangan tepat waktu	75 %
		6.	Opini pengelolaan keuangan daerah	WDP
		7.	Tanah Pemda Bersertifikat	556 bidang
		8.	Kondisi Bangunan Kantor Camat Dalam Kondisi Baik	22 Unit
		9.	Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	50 %
		10.	Lama Proses Perijinan	7 hari
28.	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	SKPD yang didampingi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	75 SKPD
29.	Meningkatnya budaya taat hukum	1.	Cakupan patrol petugas Satpol PP	12 kali
		2.	Angka Kriminalitas Tertangani	92,72
		3.	Jumlah Demo	3 Kali
30.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	1.	PNS yang mendapatkan tugas belajar	S 1/D IV: 32 S 2 : 17
		2.	Jumlah mahasiswa ikatan dinas kedokteran	5 orang
31.	Meningkatnya pemanfaatan media dan teknologi	1.	Jumlah media yang bekerjasama dengan Pemda	1 MoU
		2.	Pengelolaan Arsip secara baku	69 %
		3.	Website milik pemerintah daerah	1 unit
		4.	Pameran / Expo	1 kali

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
32.	Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan daerah	1.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	8 dokumen
		2.	Buku "Data dan Informasi Statistik Kabupaten"	1 dokumen
		3.	Buku "PDRB Kabupaten"	2 dokumen
33.	Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	1.	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan BPD terlatih	183 orang
		2.	Persentase desa dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tepat waktu	50 %
34.	Berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PKSN	1.	Panjang Jalan kabupaten dalam kota yang dibangun	18,79 km
		2.	Panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun	44.537,16 m
		3.	Panjang drainase dalam kota terbangun	23.000,05 km
		4.	Jumlah lampu penerangan jalan terpasang	12 unit
		5.	Penanganan sampah	22,60 %
35.	Berkembangnya kawasan pesisir Pantura	1.	Jumlah kelompok nelayan terbina	74 kelompok
		2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	648 ton
		3.	Tertatanya pelabuhan laut Wini	20 %
36.	Berkembangnya kawasan perbatasan	1.	Panjang jalan terbangun	41,75 km
		2.	Jumlah jembatan terbangun	1 unit

### PROGRAM DAN ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni</b>	
a.	Pengembangan perumahan	214,999,013.00
b.	Lingkungan sehat perumahan	11,263,311,350.00
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Produksi Produk Pertanian Unggulan Kabupaten</b>	
a.	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	2,308,119,324.00
b.	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	4,890,691,436.00
c.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	570,836,300.00
d.	Peningkatan kesejahteraan petani	821,535,161.00
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Produktifitas dan Produksi Peternakan di Kabupaten TTU</b>	
a.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	727,684,841.00
b.	Peningkatan produksi hasil peternakan	742,073,207.75
c.	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	394,180,000.00

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
d.	Peningkatan penerapan teknologi peternakan	247,578,200.00
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan</b>	
a.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	61,353,100.00
b.	Pengembangan budidaya perikanan	112,300,000.00
c.	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	99,699,250.00
d.	Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	40,000,000.00
e.	Peningkatan kapasitas kelembagaan	59,743,450.00
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi Koperasi, UKM dan IKM</b>	
a.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	192,122,613.00
b.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	248,004,473.59
c.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil Menengah	112,555,000.00
d.	Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif	244,019,378.72
e.	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	38,450,000.00
f.	Pengembangan industri kecil dan menengah	366,190,383.00
g.	Peningkatan kemampuan teknologi industri	92,204,580.00
h.	pengembangan sentra-sentra industri potensial	53,257,336.00
i.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	242,867,000.00
j.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	4,407,951,670.00
k.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	475,208,966.00
<b>6</b>	<b>Menguatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat</b>	
	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	2,333,050,000.00
<b>7</b>	<b>Tersedianya Pangan Utama</b>	
a.	Peningkatan ketahanan pangan	8,768,621,477.00
b.	Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	1,001,685,900.00
<b>8</b>	<b>Meningkatnya Daya Tarik Wisata</b>	
a.	Pengembangan pemasaran pariwisata	580,958,515.60
b.	Pengembangan destiniasi pariwisata	5,795,279,036.78
c.	Pengembangan kemitraan	234,921,353.92

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>9</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Penghijauan</b>	
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam (kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan)	60,900,000.00
<b>10</b>	<b>Tersedianya Sumber Air Minum Bagi Masyarakat</b>	
a.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam (kegiatan pembuatan embung)	1.490,140,725.00
b.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam (kegiatan penghijauan sumber mata air)	106,000,000.00
<b>11</b>	<b>Terkendalinya Tingkat Pencemaran</b>	
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	630,668,971.00
<b>12</b>	<b>Meningkatnya Realisasi Investasi</b>	
a.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	365,906,020.00
b.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	544,188,888.00
c.	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	120,900,000.00
<b>13</b>	<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Produktif</b>	
a.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	161,300,233.00
b.	Peningkatan kesempatan kerja	402,501,968.00
c.	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	170,816,720.00
d.	Pengembangan wilayah transmigrasi	93,999,670.00
e.	Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	20,849,943.00
<b>14</b>	<b>Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pendidikan</b>	
a.	Pendidikan anak usia dini	1,744,199,062.00
b.	Wajar pendidikan dasar 9 tahun	43,078,021,702.00
c.	Pendidikan non formal	110,288,499.00
d.	Peningkatan mutu dan tenaga kependidikan	181,047,735.00
e.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9,140,932,369.00
<b>15</b>	<b>Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat dan Layanan Perpustakaan</b>	
a.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	219,900,000.00
b.	Pengembangan perpustakaan	230,000,000.00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
<b>16</b>	<b>Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah</b>	
a.	Obat dan perbekalan kesehatan	7,264,747,538.00
b.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	55,498,095,448.00
c.	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	27,437,005,824.00
d.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	108,116,000.00
e.	Standarisasi pelayanan kesehatan	565,000,000.00
f.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	161,311,700.00
g.	Pengendalian mutu pemeriksaan laboratorium	43,739,550.00
<b>17</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan Gizi dan Masyarakat</b>	
a.	Pengawasan obat dan makanan	24,415,000.00
b.	Upaya kesehatan masyarakat	29,439,326,666.00
c.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	108,130,750.00
d.	Perbaikan gizi masyarakat	555,950,000.00
e.	Pengembangan lingkungan sehat	70,986,000.00
f.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	284,524,005.00
g.	Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	988,858,750.00
h.	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	20,317,440.00
i.	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	60,665,000.00
j.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,764,029,136.00
<b>18</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan KB</b>	
a.	Keluarga berencana	105,011,683.00
b.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)	142,562,374.00
c.	Pelayanan kontrasepsi	165,773,721.00
d.	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	67,124,195.00
e.	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	472,036,494.00
f.	Bina keluarga balita posyandu-Paud	0
g.	Dukungan sarana pelayanan KB dan sarana penyuluhan KB	1,322,890,993.00
h.	Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	676,767,798.00



NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
<b>19</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Kualitas Kehidupan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	
a.	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	1,689,982,500.00
b.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	950,566,000.00
c.	Pembinaan anak terlantar	82,800,000.00
d.	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	173,375,000.00
e.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	92,600,000.00
f.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	649,071,700.00
g.	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	625,774,500.00
h.	Kedaruratan dan logistik	985,383,000.00
i.	Pencegahan dan kesiapsiagaan	357,367,146.00
<b>20</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	
a.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	78,825,000.00
b.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	103,825,266.00
c.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	126,900,000.00
<b>21</b>	<b>Lestarnya Nilai-Nilai Budaya</b>	
a.	Pengelolaan kekayaan budaya	302,015,012.14
b.	Pengelolaan keragaman budaya	232,430,610.00
<b>22</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga</b>	
a.	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	59,099,790.00
b.	Pembinaan pemasyarakatan olahraga	371,223,928.00
<b>23</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi</b>	
a.	Pembangunan jalan dan jembatan	43,939,112,730.50
b.	Pemeliharaan jalan dan jembatan	90,000,000.00
c.	Program pembangunan turap/talud/bronjong/Pengamanan Tebing	9,935,000.00
d.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	470,004,842.00
e.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	8,544,229,947.00
f.	Program Pengembangan Sistim Informasi Jasa Konstruksi	47,208,044.00
<b>24</b>	<b>Terkendalinya Pemanfaatan Ruang</b>	
	Perencanaan Tata Ruang	1,048,558,298.00

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>25.</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih</b>	
	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	332,006,595.00
<b>26.</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	
a.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	628,095,091.00
b.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	54,999,985.00
c.	Peningkatan pelayanan angkutan	4,443,863,967.00
d.	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	0
e.	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	90,115,975.00
<b>27.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	
a.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	9,733,537,331.00
b.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2,990,130,636.00
c.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	409,226,248.00
d.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,776,298,462.00
e.	Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1,058,648,357.00
f.	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	60,799,925.00
g.	Penataan peraturan perundang-undangan	358,513,185.00
h.	Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah	1,266,617,880.00
i.	Peningkatan sumber daya penerimaan daerah	271,496,388.00
j.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	47,452,462,603.56
k.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,645,507,653.63
l.	Fasilitas pindah/purna tugas PNS	500,000,000.00
m.	Peningkatan Disiplin Aparatur	1,066,453,500.00
n.	Pembinaan bidang pemerintahan	28,575,000.00
o.	Pembinaan bidang ekonomi	12,450,000.00
p.	Pembinaan bidang sosial budaya dan pendidikan	17,750,000.00
q.	Penataan administrasi kependudukan	2,584,089,484.00
<b>28.</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	
a.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,205,963,625.00
<b>29.</b>	<b>Meningkatnya Budaya Taat Hukum</b>	
a.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	208,291,074.00
b.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	938,872,300.00

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
c.	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	168,589,850.00
d.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	91,599,900.00
e.	Pendidikan politik masyarakat	248,521,900.00
f.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1,350,000.00
g.	Pembinaan kamtibmas penataan keagrariaan	136,500,259.00
<b>30</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur</b>	
a.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,359,810,806.00
b.	Pembinaan dan pengembangan aparatur	3,908,860,389.00
<b>31</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Media dan Teknologi</b>	
a.	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	170,940,400.00
b.	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	60,000,000.00
c.	Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana kearsipan	60,000,000.00
d.	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	46,902,850.00
e.	Pegembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	331,756,134.00
f.	Kerjasama komunikasi Informasi dengan media massa	580,440,600.00
g.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	595,999,853.00
<b>32</b>	<b>Meningkatnya Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	
a.	Perencanaan pembangunan daerah	1,288,971,583.00
b.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	230,750,000.00
c.	Perencanaan pembangunan ekonomi	336,026,390.00
d.	Perencanaan sosial dan budaya	180,400,000.00
e.	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	140,000,000.00
f.	Pengembangan data/informasi	340,645,900.00
<b>33</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan keuangan Desa</b>	
a.	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	413,500,000.00
b.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2,525,247,278.00
c.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	693,387,736.00
d.	Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	2,000,000.00
e.	Peningkatan peran perempuan dipedesaan	757,857,855.00

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>34</b>	<b>Berkembangnya Kota Kefamenanu Sebagai Ume Naek Ume Mese dan PKS</b>	
a.	Perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar	0
b.	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	20,389,997,134.00
c.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	678,817,746.20
<b>35</b>	<b>Berkembangnya Kawasan Pesisir Pantai Pantura</b>	
a.	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0
b.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/nelayan	147,441,000.00
c.	Pengembangan perikanan tangkap	394,900,000.00
d.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	14,855,000.00
<b>36</b>	<b>Berkembangnya kawasan perbatasan</b>	
a.	Pengelolaan kawasan perbatasan	186,349,388.00
b.	Pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	29,997,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>436,073,046,816.39</b>

**A. CAPAIAN KINERJA**

Pencapaian kinerja dapat diketahui melalui proses pelaksanaan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan atau berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian target dari setiap indikator kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan evaluasi atau analisis kinerja. Hasil analisis ini dijadikan bahan atau informasi yang merupakan rekomendasi guna penyempurnaan upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi capaian Kinerja}}{\text{Rencana target kinerja}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Baik
70 < X ≤ 84,99	Baik
55 < X ≤ 69,99	Cukup Baik
< 54,99	Tidak Baik

Untuk capaian sasaran dihitung dengan cara menjumlahkan persentase setiap indikator kinerja dibagi dengan banyaknya indikator kinerja dalam sasaran dimaksud, yang kemudian penyimpulan hasil evaluasi kinerja pada tingkat sasaran menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Hasil capaian kinerja setiap sasaran digambarkan sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	27.526	31.876	27.606	86,60	Sangat Baik

Penjelasan terkait masalah dan solusi dalam pencapaian sasaran pembangunan rumah layak huni adalah sebagai berikut :

1. Target yang dibangun pada tahun 2017 (Target – Kondisi awal RPJMD) atau sebanyak 4.350 rumah layak huni yang dibangun di tahun 2017 untuk mencapai target dalam RPJMD;
2. Jumlah rumah layak huni yang dibangun pada Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBN Kementerian Sosil Republik Indonesia yang dilaksanakan pada 2 (dua) Desa melalui 2 (dua) program yakni Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilaksanakan di Desa Tes Kecamatan Bikomi Utara dengan membangun 45 unit rumah layak huni dengan jumlah dana sebesar Rp.675.000.000,- Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dikhususkan untuk membantu fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat dengan membangun 35 unit rumah layak huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-
3. Realisasi pembangunan rumah layak huni yang dianggarkan melalui APBD Kab. TTU Tahun Anggaran 2017 tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh karena nomenklatur kegiatan dalam petunjuk teknis tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang tertera dalam APBD Kab. TTU Tahun Anggaran 2017 sehingga penyesuaiannya dilakukan pada saat Perubahan APBD Kab. TTU Tahun Anggaran 2017. Penetapan APBD Perubahan Tahun 2017 dilaksanakan pada akhir bulan November 2017 sehingga limit waktu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sangat singkat yakni hanya selama 1 (satu) bulan. Regulasi daerah yang berhubungan dengan pembangunan rumah layak huni terus mengalami perubahan mekanisme dari sistem hibah ke sistem belanja langsung sehingga menyulitkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. TTU menyelesaikan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Timor Tengah Utara.

## 2. Meningkatnya produktivitas produksi Pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Produksi Jagung (ton)	73.111	76.767	51.888	67,59	Cukup Baik
2.	Produksi Kacang Tanah (ton)	6.110	6.416	295	4,59%	Tidak Baik
3.	Produksi Bawang Putih Lokal (ton)	67	77	4,7	6,10%	Tidak Baik
4.	Produksi Padi (ton)	46.895	49.895	44.528	89,24%	Sangat baik
5.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100	100	100	100%	Sangat Baik

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya 3 (tiga) indikator kinerja yakni Produksi jagung, produksi kacang tanah dan produksi bawang putih lokal yang tergolong dalam kategori cukup baik dan tidak baik.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Ketersediaan air yang terbatas;
2. Keterbatasan benih unggul oleh karena ketersediaan benih yang kurang serta daya beli masyarakat terhadap benih unggul sehingga petani cenderung menggunakan benih lokal yang hasilnya tidak sebanding dengan benih unggul;
3. Ketersediaan pupuk yang masih kurang;
4. Alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan permukiman dan bidang lainnya;
5. Banyak petani (tenaga kerja produktif) cenderung beralih profesi ke bidang lainnya (sektor jasa);
6. Sarana dan prasarana pendukung (alsintan) yang masih sangat terbatas.
7. Jadwal / musim tanam yang tidak menentu akibat adanya anomali iklim.

Oleh sebab itu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya alokasi anggaran yang memadai guna mendukung peningkatan produksi pertanian;



2. Pembangunan embung/waduk atau sarana dan prasarana penyedia air dalam pengembangan pertanian;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi sehingga dapat termotifasi untuk bersama-sama memusatkan perhatian pada peningkatan produksi pertanian karena merupakan potensi unggulan daerah.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang tata ruang wilayah sehingga kawasan / luas lahan pertanian tidak berkurang serta mengupayakan / mengoptimalkan pengelolaan lahan tidur dan lahan kering dapat menjadi areal pertanian.

### 3. Meningkatnya produktivitas produksi Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah ternak hasil IB (ekor)	-	250	351	140,4%	Sangat Baik
2.	Jumlah populasi ternak Sapi Bali (ekor)	115.084	117.789	122,771	104,23%	Sangat baik
3.	Luas areal HMT per kelompok tani (Ha)	-	1	0,5	50%	Tidak baik
4.	Angka Kematian Ternak (%)	10	9	6,2	131,11%	Sangat Baik

Realisasi pencapaian target kinerja indikator produksi ternak sapi bali, jumlah ternak hasil insiminasi buatan (IB), dan luas areal HMT per kelompok tani melebihi target yang ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Namun dari capaian tersebut diatas ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada sub sektor ini antara lain :

1. Tingkat disiplin aparatur yang masih rendah;
2. Dana operasional Kepala Resort Peternakan Kecamatan yang sangat minim dibandingkan frekuensi aktivitasnya di lapangan;
3. Jumlah dosis vaksinasi untuk ternak sapi belum sesuai dengan jumlah populasi;
4. Rendahnya tingkat SDM peternak;

5. Persediaan air terutama embung di padang penggembalaan sangat terbatas pada musim kemarau;
6. Rendahnya mutu genetik ternak sapi;
7. Kurangnya dukungan dana operasional IB;
8. Rendahnya alokasi anggaran untuk penyuluhan peternakan;
9. Persediaan pakan ternak dan air pada musim kemarau yang terbatas terlebih pada bulan Oktober, November dan Desember;
10. Terbatasnya tenaga dan sarana prasarana operasional IB (insiminasi buatan);
11. Rendahnya alokasi anggaran dalam pelaksanaan penyuluhan peternakan bidang PSDMP;
12. Kondisi awal RPJMD terkait indikator luas areal HMT per kelompok tani dan jumlah ternak hasil Insiminasi Buatan (IB) tidak dicantumkan dalam RPJMD Kab. TTU 2016-2021 sehingga tidak ada pembanding untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Peningkatan kesejahteraan pegawai pada umumnya;
2. Pengadaan vaksin SE harus lebih dari 10% dari jumlah populasi ternak;
3. Menaikan dana operasional Kepala Resort Peternakan, alokasi anggaran bidang produksi ternak, pakan dan insentif kegiatan IB, pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan pertolongan kelahiran hasil IB;
4. Meningkatkan frekuensi penyuluhan peternakan ditingkat petani karena pembangunan peternakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia peternak seutuhnya;
5. Program Tarambanisasi (pembudidayaan lantoro taramba secara luas dan terus-menerus);
6. Penerapan teknologi prebiotik pada usaha peternakan rakyat;

7. Perlu lebih ditingkatkan kegiatan sosialisasi program insiminasian buatan (IB) bagi para peternak di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

#### 4. Meningkatnya Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah kelompok pembudidaya ikan terbantu (kelompok)	71	74	109,23	147,60	Sangat Baik
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	150	158	162,80	108,53	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dimana kedua indikator yakni jumlah kelompok pembudidaya ikan terbantu dan jumlah produksi perikanan budidaya realisasinya melebihi target yang ditetapkan atau dengan kategori sangat baik.

Meskipun dapat terealisasi dengan sangat baik namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator dimaksud diantaranya :

1. Masih rendahnya kesadaran/minat masyarakat untuk melakukan aktifitas / usaha di bidang perikanan khususnya perikanan tangkap;
2. Penguasaan teknologi perikanan yang masih rendah oleh aparatur, pembudidaya dan nelayan serta rendahnya kemampuan manajemen usaha perikanan bagi kelompok nelayan / kelompok pembudidaya ikan;
3. Kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menyebabkan pelayanan dan pendampingan terhadap masyarakat nelayan tidak efektif;
4. Kurangnya pemantauan, pengawasan dan penertiban terhadap mutu ikan yang dipasarkan sehingga masih ditemukan adanya ikan yang berformalin / berbahan pengawet;

5. Belum adanya sarana pendaratan ikan yang memadai yang dapat digunakan untuk pendaratan / pengumpulan dan pengeluaran hasil perikanan;
6. Kesadaran nelayan / pembudidaya ikan yang masih rendah dalam mengelola aset / bantuan pemerintah yang mengakibatkan mubasirnya bantuan yang diberikan.

Solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesadaran/minat masyarakat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan maka perlu dilakukan sosialisasi secara kontinue dan dilakukan publikasi melalui media massa tentang program / kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti GEMALA (Gerakan Masuk Laut) dan PEMP (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan Pendampingan PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), Pendampingan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya, Lomba Memancing dan Lomba Kelompok Berprestasi;
2. Mengembangkan dan memperkuat usaha perikanan budidaya yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan secara terpadu;
5. Melaksanakan pelatihan, magang, studi banding, pembinaan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen usaha
6. Pembangunan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan pengadaan bahan dan alat pengujian mutu hasil perikanan;
7. Penertiban dan seleksi serta pembinaan bagi calon penerima bantuan sarana/prasarana dan dana bergulir sehingga paket bantuan sarana/prasarana yang diberikan dapat dikelola secara

baik untuk meningkatkan pendapatan para nelayan pembudidaya serta pengolah ikan;

8. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dinas perlu meningkatkan pemanfaatan tambak dinas, Balai Benih Ikan (BBI) serta optimalisasi UPR dan pendampingan petugas;
9. Perlu dilakukan Pembentukan Tim Pengawas mutu ikan dengan melibatkan petugas dinas dan aparat keamanan;
10. Pembangunan Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan pengadaan bahan dan alat uji mutu hasil perikanan.

#### 5. Meningkatnya Kompetensi Koperasi UKM, dan IKM

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	53	59	60	101,69	Sangat Baik
2.	Jumlah UKM terbina (unit)	146	166	200	120,48	Sangat Baik
3.	Jumlah IKM terbina (unit)	380	398	398	100	Sangat Baik

Sasaran ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang pencapaian target kinerjanya dikategorikan sangat baik.

Selanjutnya dapat disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Adanya keterbatasan aparatur / tenaga teknis khususnya pada bidang koperasi sehingga cenderung mengalami kendala dalam pelaksanaan pembinaan serta pendampingan;
2. Pengurus maupun pengawas belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan koperasi;
3. Sumber daya manusia para pengelola koperasi masih rendah;
4. Anggota belum berpartisipasi secara aktif dalam koperasi;
5. Terbatasnya pemahaman anggota koperasi / masyarakat umum tentang ketentuan Perkoperasian;
6. Terbatasnya modal usaha bagi pelaku UKM
7. Terbatasnya SDM pelaku UKM.

Untuk permasalahan di atas maka telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perekrutan tenaga pendamping koperasi untuk membantu pelaksanaan pembinaan melalui kerja sama Pemerintah Kab. TTU dan Pemerintah Prov. NTT;
2. Mengupayakan pelatihan bagi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi;
3. Bersama DEKOPINDA Kab. TTU melaksanakan pendidikan anggota dalam rangka memberikan pemahaman perkoperasian kepada anggota;
4. Mengadakan penyuluhan perkoperasian dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang koperasi serta proses pembentukan dan pengesahannya;
5. Pelaksanaan pelatihan bagi pelaku UKM;
6. Memfasilitasi UKM untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

## 6. Menguatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah BUMDes terbentuk (unit)	-	5	31	620	Sangat Baik
2.	Jumlah kelompok tani terbina (kelompok)	1.135	1.176	1.176	100	Sangat Baik
3.	Jumlah koperasi desa terbentuk (unit)	-	5	5	100	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2017. Pencapaian target yang sangat signifikan dapat terlihat pada indikator kinerja jumlah BUMDes terbentuk dalam tahun 2017.

Sasaran ini dicapai melalui Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) yang merupakan program turunan dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan dimaksudkan untuk menjawab

kekurangan kapasitas fiskal pemerintahan desa. Dengan program ini diharapkan pemerintah dan masyarakat desa dapat merencanakan serta melaksanakan sendiri pembangunan desanya sesuai kebutuhan prioritas di bidang pertanian.

Fokus utamanya adalah untuk pemberdayaan kelompok tani sesuai dengan aspirasi kelompok tani serta potensi dan karakteristik wilayah guna menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat desa, serta mengembangkan produk unggulan daerah.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan mentalitas sasaran penerima program yang masih berorientasi konsumtif dan bukan pada peningkatan produktifitas;
2. Lemahnya pendampingan dan pengawasan dari Pemerintahan Desa;
3. Kurangnya koordinasi lintas sektor.

Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan pembinaan secara berkala langsung ke sasaran penerima program;
2. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penagihan dana yang bergulir di kelompok;
3. Untuk mengefektikan pelayanan dan pendampingan ditempatkan tenaga pendamping pada desa sesuai domisilinya;
4. Memperbaiki pola penyaluran dana dengan memverifikasi calon sasaran penerima bantuan secara baik;
5. Melaksanakan koordinasi lintas sektor secara berkala melalui rapat koordinasi dan evaluasi.

## 7. Tersediannya Pangan Utama

No	Indikator Kinerja	2016	2017		
		Kondisi	Target	Realisasi	%

		Awal RPJMD				
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah Desa rawan pangan tertangani (desa)	59	70	30	42,86	Tidak Baik
2.	Tersedianya Lumbung Pangan Desa (unit)	11	20	10	50	Cukup Baik
3.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	46,3	52,30	25,50	39,20	Tidak Baik

Upaya pencapaian target ini dikoordinasikan oleh Dinas Pangan. Ketahanan pangan merupakan ketersediaan bahan makanan atau pangan dimana setiap individu mampu memperolehnya sebagai kebutuhan dasar. Ketahanan pangan dapat tercipta jika individu mendapatkan kebutuhan pangan atau makanan yang bergizi dan memberikan manfaat untuk dirinya serta aman di konsumsi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator 3 (tiga) indikator tersebut diatas antara lain :

1. Pembangunan lumbung pangan desa sebagai wadah penampung hasil pangan utama di Desa belum dibangun di semua desa. Pembangunan lumbung pangan hanya dilakukan pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 tidak tersedia dana untuk pembangunan lumbung pangan baik dari APBD maupun DAK dari Kementerian.
2. Ketersediaan pangan sangatlah erat dengan jumlah produksi komoditi pangan utama dalam daerah yang dihasilkan oleh Petani.

Terkait permasalahan tersebut diatas maka solusi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana yang cukup memadai untuk pembangunan lumbung pangan guna tercapainya target indikator kinerja terkait lumbung pangan desa;
2. Peningkatan koordinasi antar instansi yang mempunyai peran penting dalam peningkatan produksi pangan utama antara lain Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Pengairan);



3. Peningkatan kapasitas aparatur terutama PPL dan tenaga teknis pertanian melalui pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
4. Peningkatan ketahanan pangan melalui ekstensifikasi, intensifikasi serta diversifikasi pertanian.

## 8. Meningkatnya Daya Tarik Wisata

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	46.380	46.844	51.100	425.60	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kategori sangat baik. Hal ini disebabkan oleh karena program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian target pada indikator sasaran dimaksud yakni melalui promosi kepariwisataan yang digencarkan dengan program penataan kepariwisataan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah, Pemeliharaan Rutin Obyek Wisata Tanjung Bastian dan Oeluan, Perekaman dan Pendokumentasian Event Kepariwisata, Pacuan Kuda dan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten TTU.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penataan Obyek Wisata belum dilakukan secara optimal;
2. Minimnya kreatifitas pengembangan dan pemanfaatan potensi obyek dan daya tarik wisata;
3. Promosi pariwisata masih sangat kurang;
4. Masih terdapat wisatawan yang masuk mengikuti event pariwisata tanpa sepengetahuan penyelenggara sehingga banyak wisatawan yang belum terdata.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya penataan, pengembangan dan pemeliharaan Obyek Wisata yang ada maupun potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dimiliki daerah;
2. Perlunya mengembangkan potensi objek kepariwisataan dan meningkatkan promosi pariwisata keluar daerah;
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta mengembangkan kemampuan SDM pelaksana urusan pariwisata secara bertahap menyesuaikan dengan prioritas anggaran yang ada.
4. Penyelenggaraan kegiatan festival perlu dilaksanakan secara kontinue;
5. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan dan memelihara obyek wisata.

#### 9. Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Penghijauan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Sangat Baik yang direboisasi (Ha)	10	30	-	0	Tidak baik

Pencapaian target kinerja sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan kategori capaian tidak baik karena program yang mendukung indikator sasaran tersebut tidak diakomodir dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2017. Pemahaman aparatur pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup masih rendah terkait perencanaan program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja sasaran dalam RPJMD.

#### 10. Tersedianya Sumber Air Minum bagi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	2016	2017		
		Kondisi	Target	Realisasi	%

		Awal RPJMD				
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah Mata Air yang terpelihara (unit)	-	482	-	-	-

Indikator jumlah sumber mata air yang terpelihara dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja tidak baik (kegiatan tidak terlaksana). Beberapa permasalahan yang mengakibatkan pencapaian sasaran tersebut tidak terlaksana antara lain :

1. Keterlambatan instansi penyelenggara sasaran dalam memulai kegiatan dimaksud;
2. Rasa pesimis akan tidak tercapainya sasaran tersebut karena keterlambatan pembentukan tim survei dan tim pelaksana (dibentuk pada triwulan IV Bulan November) sehingga dana yang telah dianggarkan tidak digunakan dan dikembalikan ke kas Daerah karena pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu;

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka solusi dan atau langkah antisipatif yang diambil adalah instansi penyelenggara kegiatan menyusun kalender kerja dengan memprioritaskan kegiatan yang menjadi sasaran dalam RPJMD 2016-2021 agar semua indikator yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah dapat terlaksana setiap tahunnya guna tercapainya indikator di akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### 11. Tekendalinya Tingkat Pencemaran

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Status Mata Air Minum Teruji (%)	0	10	9	90	Sangat baik

Indikator status mata air minum teruji pencapaiannya dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan capaiannya tergolong dalam kategori Sangat Baik.

Meskipun tergolong dalam kategori sangat baik namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian guna tercapainya indikator sasaran tersebut di tahun mendatang. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah aparatur dalam menguji status mutu air minum. Solusi terkait permasalahan tersebut diatas adalah dengan tambahan anggaran dan penambahan staf guna tercapainya target yang telah termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2016-2021.

## 12. Meningkatnya Realisasi Investasi

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah Investor (PMA/PMDN) (investor)	25	26	21	80,77	Sangat baik
2.	Nilai Investasi (milyar)	92,5275	102,404	614.064	559,67	Sangat Baik

Untuk sasaran ini, pencapaiannya dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Target ini belum mampu mencapai target tahun 2017 yaitu sebanyak 26 Investor.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Para investor (PMA/PMDN) yang menanamkan modal atau berinvestasi di daerah tidak pernah melaporkan diri atau memberikan data / profil perusahaan sehingga sulit untuk mengetahui perkembangan jumlah investor serta menghitung jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan-perusahaan tersebut;
2. Kurangnya Rapat Koordinasi dan kerja sama lintas sektor;
3. Terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat tentang investasi;
4. Terbatasnya data potensi daerah;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana berupa :
  - a. Gedung Kantor yang belum memadai;

- b. Tidak ada alat rekaman yang memadai;

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap calon investor/investor yang ingin berinvestasi, agar melaporkan diri kepada Dinas PMPTSP sebagai instansi yang berkompeten di bidang Penanaman Modal Daerah;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui Sosialisasi Investasi bidang Penanaman Modal;
3. Melakukan pendataan dan kajian tentang data potensi daerah;
4. Meningkatkan Rapat Koordinasi dan kerja sama lintas sektor;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur Dinas PMPTSP.

### 13. Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Produktif

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah tenaga Kerja Terlatih (orang)	25	50	185	370%	Sangat Baik
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,17	73	75,35	107,64	Sangat Baik
3.	Ratio Ketergantungan (%)	73,75	73,25	59,24	80,85	Sangat baik

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan dikategorikan sangat baik. Khusus untuk indikator jumlah tenaga kerja terlatih dan tingkat partisipasi angkatan kerja jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan angka yang sangat memuaskan.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam upaya pencapaian sasaran merupakan masalah umum yang sering terjadi, beberapa diantaranya :

1. Jumlah Angkatan Kerja yang Besar

Besarnya angkatan kerja yang ada tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak

berimbang jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja.

## 2. Kualitas tenaga Kerja Relatif Rendah

Kualitas tenaga kerja yang rendah disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja disebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang ujung-ujungnya menyebabkan proses produksi yang tidak efisien.

## 3. Beralihnya pekerjaan

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian daerah namun hal ini cenderung tidak dimanfaatkan oleh angkatan kerja produktif untuk memanfaatkan potensi ini. Angkatan kerja yang ada cenderung beralih profesi ke sektor jasa dan *image* yang berkembang pekerjaan bertani merupakan pekerjaan yang kurang menjanjikan.

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Jumlah angkatan kerja yang besar disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana. Pemaksimalan program keluarga berencana dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan KB secara intens kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan yang baru menikah. Sehingga semakin tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana. Hal ini juga bisa dilakukan dengan membatasi usia nikah sehingga dapat menekan

terjadi pernikahan dini. Jika program KB berjalan baik, maka jumlah angka pertumbuhan atau kelahiran akan menurun, demikian pula dengan angkatan kerja tentunya akan semakin berkurang. Apabila penurunan jumlah angkatan kerja yang berkurang ini, diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, maka jumlah pengangguran juga berkurang.

2. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pemagangan kerja. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Melakukan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini merupakan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan persyaratan pekerjaan. Dengan demikian melalui pelatihan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kerja para tenaga kerja.
  - b. Pemagangan.  
Pemagangan ini sebenarnya merupakan bagian dari pelatihan kerja, namun pemagangan ini langsung dilakukan di tempat kerja. Tujuan pemagangan adalah untuk memantapkan profesionalitas tenaga kerja. Hal ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah khususnya sekolah kejuruan (SMK) seperti yang dilakukan saat ini. Pemagangan harus dilakukan sesuai dengan jurusan atau jenis pekerjaan yang digelutinya.
  - c. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal. Melalui pendidikan formal, ini dapat dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun seperti saat ini di lakukan. Sedangkan melalui pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan memberikan kursus-kursus atau pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan

dan sebagainya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan potensi pertanian.

3. Mengadakan transmigrasi, yaitu usaha pemerataan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.
4. Pemberdayaan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim angkatan kerja ke daerah ataupun ke negara lain yang kekurangan tenaga kerja.
5. Pengembangan usaha sektor informal, seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan. Misalnya, usaha tenun, anyaman, kerajinan kayu, dan lain-lain.

#### 14. Meningkatnya Aksestabilitas dan Pemerataan Pendidikan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	APM PAUD (%)	34,97	43,97	76,77	176,64	Sangat baik
2.	APM SD (%)	97,76	98,5	98,27	99,76	Sangat baik
3.	APM SMP (%)	85,99	88	97,13	110,37	Sangat baik
4.	Angka Melek Huruf (%)	93,45	94	90,16	95,91	Sangat baik
5.	Angka Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	6,69	7,19	7,39	102,78	Sangat Baik
6.	Sekolah SD/MI kondisi bangunan Baik (%)	80,15	83,12	14,96	17,99	Tidak Baik
7.	Sekolah SMP/MTs Kondisi bangunan baik (%)	57,14	60,74	18,69	30,77	Tidak Baik
8.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,30	99,40	99,59	100,19	Sangat baik
9.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,97	99,98	99,52	99,53	Sangat baik
10.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	92,16	86,12	94,19	109,37	Sangat baik
11.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	84,92	86,12	85,64	99,44	Sangat baik
12.	Guru yang Memenuhi kualifikasi S1 / D IV (%)	67,65	69,65	86,52	124,22	Sangat baik

Secara umum pencapaian sasaran ini melalui indikator yang telah ditetapkan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya untuk pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sasaran yang dicapai dikategorikan sangat baik, namun ada indikator yang masih perlu mendapat perhatian. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi :



1. Masih ditemui adanya jumlah penduduk usia sekolah khususnya yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas;
2. Terbatasnya guru kelas / guru mata pelajaran pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
3. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan perpustakaan sekolah serta sarana dan prasarana lainnya;
4. Masih banyak guru yang belum disertifikasi;
5. Masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah negeri dengan guru di sekolah swasta;
6. Penyebaran guru dan tenaga pendidik antar wilayah dan antar sekolah belum merata dan proporsional;
7. Perlunya pengalokasian anggaran yang memadai guna mewujudkan pencapaian kinerja sesuai rencana strategis;
8. Kompetensi Kepala Sekolah masih dibawah standar;
9. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas.

Untuk beberapa permasalahan di atas, maka disarankan beberapa hal antara lain :

1. Peningkatan kompetensi guru melalui tes *diagnostic online* dan peningkatan kualifikasi pendidikan serta program sertifikasi guru;
2. Menuntaskan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah;
3. Memberikan fasilitas penunjang bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi berupa beasiswa terutama pada jenjang SMP dan SMA;
4. Meningkatkan profesionalisme guru serta kepala sekolah melalui workshop, bimtek dan diklat;

5. Mengusulkan formasi guru mata pelajaran/bidang studi dalam formasi pengadaan CPNSD dan atau pengangkatan guru kontrak sesuai kebutuhan pada setiap jenjang pendidikan;
6. Mengusulkan penempatan guru PNS pada sekolah-sekolah secara merata dan proporsional pada setiap jenjang pendidikan;
7. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten TTU.

### 15. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca masyarakat dan layanan perpustakaan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah pengunjung Perpustakaan Per tahun (orang)	17.098	19.000	52.611	276,9	Sangat baik
2.	Jumlah Desa yang memiliki perpustakaan (desa)	75	96	77	80,20	Sangat baik
3.	Judul Buku yang tersedia di perpustakaan (judul)	24.764	24.923	13.800	55,37	Cukup Baik
4.	Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan (exemplar)	94.745	96.245	27.609	28,67	Tidak Baik

Pencapaian sasaran ini dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimana dari indikator yang ditetapkan terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori tidak baik yaitu jumlah buku yang tersedia di perpustakaan, 1 (satu) kategori cukup baik yaitu judul buku yang tersedia di perpustakaan yang tersedia di perpustakaan serta 2 (dua) kategori sangat baik yaitu jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dan jumlah desa yang memiliki perpustakaan.

Beberapa permasalahan dan faktor penghambat dalam upaya pencapaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Masih minimnya anggaran terutama untuk penambahan jumlah buku dan jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan perpustakaan sekolah serta sarana dan prasarana lainnya;

Solusi guna mengatasi masalah-masalah tersebut diatas antara lain :

1. Perlunya pengalokasian anggaran yang memadai guna mewujudkan pencapaian kinerja sesuai rencana strategis terutama untuk penambahan jumlah dan judul buku yang tersedia di perpustakaan;
2. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya;

### 16. Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Ratio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000) (%)	0,16	0,17	0,12	70,59	Baik
2.	Ratio Posyandu Persatuan Balita (per 1000) (%%)	19,33	20,83	17,06	81,90	Sangat Baik
3.	Ratio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (per 1000) (%)	0,90	1,00	1,18	118	Sangat Baik
4.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	93,89	94,94	96,65	101,80	Sangat Baik
5.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)	18,97	30,97	5,07	16,37	Tidak Baik
6.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten (%)	50	60	100	166,66	Sangat Baik

Untuk pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Meskipun secara umum dikategorikan sangat baik namun terdapat indikator yang dikategorikan tidak baik yakni angka kematian balita. Ini perlu mendapat perhatian serius sehingga dalam waktu mendatang dapat mencapai target yang ditentukan.

Secara umum dapat disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain :


1. Masih adanya beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan secara dini pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Kurangnya koordinasi lintas sektor untuk penanganan kehamilan beresiko di wilayah puskesmas sehingga masih ada penanganan kelahiran dan kehamilan yang terlambat mendapatkan pelayanan;
3. Belum optimalnya sistem rujukan kasus resiko tinggi kehamilan dan kelahiran;
4. Adanya faktor gender (budaya) yang mempengaruhi ibu tidak dapat mengambil keputusan sendiri;
5. Masih minimnya dokter spesialis (SpOg & Anashtesi);
6. Faktor geografis yang menghambat sistem rujukan;
7. Keterampilan tenaga kesehatan untuk penanganan kasus pada neonatal masih kurang;
8. Peralatan penanganan neonatal belum memadai;
9. Ibu dan keluarga belum mengenal tanda-tanda bahaya pada neonatal;
10. Terlambatnya kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan;
11. Kurangnya KIE oleh tenaga kesehatan bagi sasaran ibu hamil;
12. Kurangnya kemitraan bidan, dukun dan kader;
13. Kunjungan bayi / balita rendah setelah mendapat imunisasi lengkap;
14. Kemampuan ekonomi keluarga yang kurang terutama masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk melahirkan di puskesmas;
15. Sistem pencatatan dan pelaporan belum akurat menyangkut KB;
16. Kurangnya KIE tentang metode kontrasepsi efektif.

Strategi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain;

1. Melakukan advokasi dan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini melalui lembaga pendidikan yang ada;

2. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan untuk melakukan pertolongan kasus-kasus resiko kehamilan dan kelahiran dengan mengadakan kegiatan magang, refreshing, pelatihan dan pertemuan secara berkala;
3. Menyiapkan sarana pelayanan kesehatan PONED di puskesmas secara bertahap;
4. Menyiapkan alur rujukan kasus resiko tinggi kehamilan dan kelahiran;
5. Sosialisasi pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil, salin dan nifas pada komunitas;
6. Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk mendatangkan dokter spesialis yang belum ada ( SpOg & Anashtesi);
7. Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk perbaikan infrastruktur daerah terutama daerah sulit;
8. Pengadaan peralatan kesehatan yang masih kurang terutama untuk penanganan neonatal;
9. Sosialisasi pengenalan tanda bahaya pada neonatal bayi dan balita bagi ibu dan keluarga;
10. Meningkatkan KIE oleh tenaga kesehatan bagi masyarakat dan sasaran KIA;
11. Meningkatkan kemitraan Bidan, Dukun dan Kader;
12. Mengadakan kegiatan FGD di tingkat desa/kelurahan;
13. Meningkatkan KIE oleh tenaga kesehatan bagi masyarakat dan sasaran KIA;
14. Sosialisasi tentang JKN Mandiri;
15. Mengaktifkan Tabulin;
16. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan KIA dan KB;
17. Meningkatkan KIA oleh tenaga kesehatan bagi masyarakat dan sasaran PUS;
18. Membentuk posyandu lansia di 4 wilayah puskesmas.

## **17. Meningkatnya Status Kesehatan Gizi dan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	2016	2017
85	 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten TTU 2017		

		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	AKI (per100.000 KH)	215,6	192,95	39,50	179,5	Sangat Baik
2.	AKB (per 100)	24,1	23	15,80	131,30	Sangat Baik
3.	Gizi buruk (%)	0,44	0,39	0,16	158,97	Sangat Baik
4.	Ratio ketersediaan obat (%)	96,15	96,92	100	103	Sangat Baik
5.	Angka harapan hidup (%)	65,89	65,90	66,04	100,15	Sangat Baik
6.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	67,90	72,90	67,6	92,72	Sangat Baik
7.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	82,85	84,25%	63,6	75,48	Baik
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82,91	84,41	75,8	89,79	Sangat Baik
9.	Cakupan pelayanan nifas (%)	81,61	83,21	74,8	89,89	Sangat Baik
10.	Cakupan noenatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	77,12	78,72	51,3	65,16	Cukup Baik
11.	Cakupan kunjungan bayi (%)	87,96	89,46	102,1	114	Sangat Baik
12.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	58,55	66,55	66,0	99,17	Sangat Baik
13.	Cakupan pelayanan balita (%)	56,39	63,39	62,1	97,96	Sangat Baik
14.	Cakupan pemberian makanan pedamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	12,53	29,53	42,33	143,34	Sangat Baik
15.	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	Sangat Baik
16.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95,37	96,37	82,4	85,50	Sangat Baik
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	30,96	47,96	91,42	196,87	Sangat Baik
18.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	Sangat Baik
19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare (%)	70,06	77,56	28,09	36,12	Tidak Baik
20.	Cakupan desa siaga aktif (%)	65,70	70,70	46,86	69,10	Cukup Baik

Untuk pencapaian sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dengan sangat baik. Berikut akan disampaikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja atas sasaran dimaksud.

1. Indikator Angka Kelahiran Ibu (per100.000 KH) walaupun tergolong kategori sangat baik namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius yakni :
  - a. Masih adanya persalinan dengan resiko tinggi;
  - b. Penanganan yang terlambat oleh petugas;
  - c. Sistem rujukan belum berjalan sesuai ketentuan.

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara dini;
  - b. Melakukan screening secara berkala;
  - c. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan;
  - d. Meningkatkan sistem rujukan.
2. Indikator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup target awal RPJMD tahun 2017 yaitu 23% dalam realisasinya 15,80% ini berarti dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan berhasil menurunkan angka kematian bayi dengan kategori sangat baik namun ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni:
- a. Masih lambatnya penanganan saat sakit;
  - b. Sistem rujukan belum berjalan sesuai ketentuan;

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Peningkatan kesadaran keluarga dan petugas kesehatan dalam penanganan anak sakit;
  - b. Penanganan yang cepat dan tepat dari petugas;
  - c. Meningkatnya sistem rujukan.
3. Indikator presentase balita gizi buruk memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- a. Ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga tidak mencukupi;
  - b. Balita menderita sakit;
  - c. Pola asuh dan pola makan yang salah.

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam penyediaan pangan ditingkat keluarga;
- b. Meningkatnya upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi untuk penanganan kasus gizi;

- c. Meningkatkan kesadaran keluarga agar dapat memberikan makanan bergizi bagi balita melalui konseling gizi.
4. Indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4 memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- a. Penjaringan ibu hamil K1 standar masih rendah
  - b. Masih terdapat kehamilan diluar nikah, sehingga ibu hamil malu memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan
  - c. Pencatatan pelaporan program kesehatan ibu dan anak seperti kohort ibu, bayi, balita dan anak prasekolah belum tercatat secara baik dan akurat
  - d. Kantong persalinan belum dimanfaatkan secara maksimal
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :
- a. Melakukan penjaringan ibu hamil baru (K1 standar) ke desa terutama bagi PUS DO KB, PUS yang tidak KB dan calon atau pengantin baru. Bila ditemukan ibu positif hamil segera dilakukan Antenatal Care (ANC)
  - b. Bidan harus selalu memonitoring kantong persalinan
  - c. Memperbaiki system pencatatan dan pelaporan
  - d. Bidan coordinator puskesmas berkoordinasi terus menerus dengan bidan di desa
  - e. Advokasi kepada stakeholder dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
5. Indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- a. Pendataan sasaran ibu hamil belum maksimal
  - b. Belum semua ibu hamil dilakukan penapisan pada saat pemeriksaan kehamilan (ANC);
  - c. Kurangnya pemahaman bidan tentang penanganan kasus resiko tinggi;
  - d. Belum semua sasaran ibu hamil terpasang stiker P4K dan bendera ibu hamil.



Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Meningkatnya system pencatatan dan pelaporan;
  - b. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan screening ibu hamil;
  - c. Mengaktifkan kembali pemasangan P4K dan bendera ibu hamil;
6. Indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- a. Masih ada persalinan yang dilakukan dirumah dan polindes;
  - b. Ronda siaga 7 tidak berjalan dengan baik;
  - c. Kantong perkiraan persalinan kurang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Persalinan harus dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yang memadai (puskesmas);
  - b. Mengaktifkan kembali ronda siaga 7 di desa;
  - c. Pemanfaatan kembali dan memantau kantong perkiraan persalinan;
  - d. Meningkatnya kemitraan bidan dengan dukun, kader dan anggota masyarakat lainnya.
7. Indikator cakupan pelayanan nifas memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni kurangnya kunjungan rumah ibu nifas. Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain meningkatnya kunjungan nifas oleh bidan.
8. Indikator cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni:
- a. Kurangnya kerjasama antar dokter, bidan dan perawat dalam penanganan kasus komplikasi obstetir dan neonatal;

- b. Kurangnya ketersediaan peralatan dan obat-obatan kegawatdaruratan;
- c. Bendera ibu hamil sesuai resiko tidak dipasang lagi di rumah ibu hamil.

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi tim PONEB;
  - b. Alat dan obat-obatan harus dalam keadaan siap pakai;
  - c. Bidan harus selalu mempelajari protap KIA;
  - d. Mendatangkan dokter ahli dari RSUD ke puskesmas untuk membahas kasus komplikasi obstetric dan neonatal;
  - e. Mengaktifkan kembali bendera ibu hamil;
  - f. Memperbaiki pencatatan dan pelaporan.
9. Indikator cakupan desa atau kelurahan UCI memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni:
- a. Kurangnya koordinasi antar pengelola program di puskesmas;
  - b. Pendataan sasaran riil di tingkat bawah (puskesmas,ustu, bides) belum valid;
  - c. Pencatatan dan pelaporan belum memadai;
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :
- a. Meningkatkan koordinasi antar pengelola program di puskesmas;
  - b. Melakukan update data sasaran secara terus menerus;
  - c. Memperbaiki system pencatatan dan pelaporan.
10. Indikator cakupan pelayanan anak balita memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni sistem pencatatan pelaporan yang kurang baik. Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain memperbaiki system pencatatan dan pelaporan.

11. Indikator cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- Tidak tersedia dana untuk pengadaan MP-ASI dari APBD II;
  - MP-ASI yang berasal dari pusat tidak mencukupi;
  - Sulit mencari rekanan untuk pengadaan MP-ASI.
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- Pengadaan MP-ASI dari APBD II untuk tahun 2018;
  - Mengajukan permintaan MP-ASI ke pusat sebagai buffer stock di Kabupaten;
  - Mencari pabrikan MP-ASI.
12. Indikator cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- Masih ada beberapa kasus yang tidak mau dirujuk ke TFC sehingga dirawat di puskesmas;
  - Ketersediaan tenaga di TFC masih kurang
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- Perlu mempertahankan dan meningkatkan kegiatan penanganan kasus;
  - Koordinasi lintas sector terutama pimpinan wilayah untuk kasus yang tidak mau dirujuk
  - Pemenuhan tenaga di TFC.
13. Indikator cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat memiliki permasalahan yang perlu diperhatikan yakni petugas melakukan penjarangan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain menekankan kepada puskesmas agar segera melakukan penjarangan di bulan agustus.

14. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD mencapai realisasi 100% dari target yang ditentukan, ini berarti tidak adanya hambatan yang berarti dalam penanganan kasus DBD namun untuk mencegah terjadinya penyakit DBD maka harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya kasus dan melaksanakan fogging bila terdeteksi ada kasus DBD.
15. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare perlu mendapatkan perhatian serius sehingga dalam waktu mendatang dapat mencapai target yang ditentukan.
- Secara umum dapat disampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain :
- a. Pengetahuan dan ketrampilan pengelola program masih kurang;
  - b. Kurang ketersediaan air bersih di desa;
  - c. Pencatatan dan pelaporan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pengelola program puskesmas;
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain :
- a. Peningkatan pengetahuan ketrampilan kepada para pengelola program;
  - b. Peningkatan koordinasi untuk penyediaan air bersih di desa;
  - c. Pencatatan dan pelaporan agar dilaksanakan lebih baik;
16. Indikator penderita diare yang ditangani memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- a. Pengetahuan dan ketrampilan pengelola program masih kurang;
  - b. Kurangnya ketersediaan air bersih di desa;
  - c. Pencatatan dan pelaporan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pengelola program puskesmas.
- Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- a. Peningkatan pengetahuan ketrampilan kepada para pengelola program;
  - b. Peningkatan koordinasi untuk penyediaan air bersih didesa;

- c. Pечатatan dan pelaporan agar dilaksanakan lebih baik.
17. Indikator presentase desa siaga aktif memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yakni :
- Belum semua desa menjadi Desa Siaga;
  - Beberapa desa siaga yang sudah dibentuk tidak berjalan dengan aktif;
  - Kurangnya koordinasi dan pendampingan dari puskesmas, pemerintah kecamatan dan desa

Solusi atau upaya pemecahan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- Menyediakan anggaran untuk pembentukan desa siaga;
- Penyegaran/mengaktifkan desa siaga yang tidak aktif;
- Koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk menambah desa siaga;
- Pendampingan dari puskesmas, pemerintah kecamatan dan desa.

## 18. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	55	56	53,89	96,23	Sangat Baik

Untuk capaian sasaran ini dilaksanakan / dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. PMM Peserta KB aktif dan peserta KB baru merupakan hasil penetapan perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang mau dicapai dalam pelayanan program keluarga berencana tahun 2017 di Kabupaten Timor Tengah Utara dan telah di bagi habis menurut kecamatan.

a. Pemenuhan kebutuhan masyarakat (PKM) terhadap pemenuhan permintaan masyarakat (PMM) peserta KB aktif masing-masing kecamatan dengan kategori sebagai berikut :

- Kategori baik (80-100%) sebanyak 22 kecamatan dengan kisaran capaian 87,74% kategori baik nilai terendah pada kecamatan Noemuti Timur dan 153,47% kategori baik nilai tertinggi pada Kecamatan Biboki Utara.
- Kategori cukup (60-79%) sebanyak 1 kecamatan dengan capaian 66,16% yaitu Kecamatan Insana Barat.
- Kategori kurang (<60%) sebanyak 1 kecamatan dengan capaian 57,51% yaitu Kecamatan Kota Kefamenanu.

Keseluruhan capaian pemenuhan kebutuhan masyarakat (PKM) peserta KB aktif sebesar 17.537 dari PMM PA 16.751 atau sebesar 104,69% dengan kategori baik.

b. Pemenuhan kebutuhan masyarakat peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur untuk tiap kecamatan dengan kategori sebagai berikut :

- Kategori baik (80-100%) sebanyak 0 kecamatan
- Kategori cukup (60-79%) sebanyak 9 kecamatan dengan kisaran capaian 60,72 – 77,46%, kategori cukup nilai terendah 60,72% yaitu kecamatan Miomaffo Barat dan kategori cukup nilai tertinggi 77,46% yaitu kecamatan Bikomi Selatan.
- Kategori kurang (<60%) sebanyak 15 kecamatan dengan kisaran capaian 31,09 – 59,76%, kategori kurang nilai terendah 31,09% yaitu kecamatan Kota Kefamenanu dan kategori kurang nilai tertinggi 59,76% pada kecamatan Bikomi Tengah.

Total pemenuhan masyarakat (PKM) peserta KB aktif terhadap PUS sebesar 53,89% dengan kategori kurang.

**19. Meningkatkan akses dan kualitas kehidupan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial**

No	Indikator Kinerja	2017			
		2016 Kondisi	Target	Realisasi	%

		Awal RPJMD				
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah PMKS yang dibantu (%)	72,16	75	75	100	Sangat Baik

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial di koordinasikan oleh Dinas Sosial. Pada tahun 2017, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sesuai target untuk dilayani seluruhnya dilayani. Jenis PMKS dimaksud antara lain :

- a. Fakir Miskin : 30 orang
- b. Komunitas Adat Terpencil (KAT) : 3 lokasi/75 KK
- c. Anak Jalanan : 20 orang
- d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi : 40 orang/KK
- e. Ex Bekerja Migran Bermasalah : 32 kasus
- f. Anak Terlantar : 20 orang
- g. Penyandang Cacat Potensial : 25 orang
- h. Ex Napi : 20 orang

## 20. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)	10	8	82	-825	Tidak Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kategori tidak baik karena menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang signifikan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 dalam RPJMD Kab. TTU Tahun 2016-2021.

Sampai dengan saat ini, indikator menurunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum jelas pengkoordinasiannya karena

ada beberapa SKPD termasuk instansi / lembaga lain yang berkompeten untuk melaksanakan / mengupayakan pencapaian indikator ini yang tidak diikuti dengan sebuah lembaga / forum yang mewadahi SKPD / lembaga yang berkompeten dimaksud.

Untuk Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Kesejahteraan Sosial. Oleh DP3A hanya melaksanakan tindakan preventif sebatas sosialisasi dan pembinaan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sedangkan Dinas Kesejahteraan Sosial pada tahun 2015 sampai dengan saat ini melalui LK3 Nekmese (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga) melaksanakan tindakan preventif, kuratif dan rehabilitasi yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD II. Tindakan kuratif yang dilaksanakan oleh lembaga ini berupa pendampingan korban dalam penyelesaian masalah tindak kekerasan serta rehabilitasi berupa bantuan modal usaha terhadap korban tindak kekerasan.

LK3 Kabupaten Timor Tengah Utara telah baik melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga menjadi salah satu lembaga yang dijadikan contoh / model bagi LK3 lainnya di Indonesia.

Ke depan yang perlu menjadi perhatian adalah dibentuk / diaktifkan kembali P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sehingga bisa mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kasus KDRT.

## 21. Lestarinya nilai-nilai budaya

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah festival budaya yang diselenggarakan (kali)	3	4	4	100	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan kategori sangat baik. Pelaksanaan festival budaya menjadi event tahunan yang perlu dilaksanakan secara terus menerus



guna memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten TTU dapat menetapkan anggaran yang cukup memadai untuk setiap tahunnya demi mendukung keberlangsungan event-event yang terkait guna pelestarian dan pengembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## 22. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah olahraga kepemudaan terbina (organisasi)	-	2	17	850	Sangat Baik
2.	Jumlah club olahraga yang bantu (klub)	-	1	15	1500	Sangat Baik
3.	Jumlah even olahraga yang diselenggarakan (kali)	-	1	10	1000	Sangat Baik

Pencapaian indikator ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan kategori sangat baik. Meskipun tergolong dalam kategori sangat baik namun dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian guna tercapainya indikator-indikator tersebut di tahun mendatang. Salah satu indikator yang perlu dibenahi kedepan adalah kegiatan Kepemudaan dan Olahraga perlu mendapat perhatian serius dimana jumlah event olahraga yang dilaksanakan dan klub olahraga terbina menjadi salah satu tolok ukur berkembangnya cabang olahraga yang mampu menciptakan atlet-atlet potensial dari Kabupaten TTU.

## 23. Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Panjang jalan kabupaten	346,78	379,29	407,45	107,42	Sangat Baik

	yang dibangun dan rehabilitasi (km)					
2.	Jumlah jembatan yang dibangun (unit)	110	112	112	100	Sangat Baik
3.	Panjang saluran irigasi terbangun (ha)	34.974,82	37.975,22	41.298,22	108,75	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kategori sangat baik dengan keseluruhannya melampaui target yang telah ditetapkan. Namun dalam upaya pencapaian kinerja sasaran memiliki beberapa permasalahan yaitu:

1. Personil PNS di bidang teknik masih kurang dan tidak sebanding dengan beban kerja OPD, sedangkan aparatur PNS yang memiliki peran penting pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada yang merangkap tugas di OPD lain;
2. Belum optimalnya kinerja pihak swasta (penyedia barang/jasa) dalam pengadaan barang/jasa;
3. Kurangnya pelatihan/pendidikan teknis di bidang pekerjaan umum dan administrasi pemerintahan;
4. Ketersediaan alat-alat berat di Kabupaten TTU umumnya masih kurang, sedangkan waktu pelaksanaan fisik proyek biasanya dilaksanakan secara serentak dan menyebar. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian fisik pekerjaan;
5. Faktor alam yang dapat merubah kondisi fisik lapangan pasca desain/perencanaan. Hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian ulang desain/perencanaan, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dapat bergeser dari waktu yang direncanakan;
6. Adanya persoalan sosial di masyarakat dan kepentingan individu/kelompok masyarakat yang berkaitan dengan lahan/tanah pada lokasi proyek, sehingga menghambat pelaksanaan proyek;

Langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain :

1. Perlunya penambahan aparatur yang berkualifikasi pendidikan teknik bidang jalan, sumber daya air dan IT;

2. Terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pihak swasta (penyedia barang/jasa) dalam pengadaan barang/jasa;
3. Perlunya alokasi anggaran yang cukup untuk pelatihan/pendidikan teknis di bidang pekerjaan umum dan administrasi pemerintahan guna menyediakan SDM aparatur yang terampil dan berkualitas;
4. Secara berkala dan kontinyu perlu melakukan pengadaan alat-alat berat untuk mengurangi efek kekurangan alat-alat berat di Kabupaten TTU;
5. Meningkatkan mutu dan kualitas desain/perencanaan sehingga dapat mengantisipasi pengaruh faktor alam dan terjaminnya kualitas konstruksi proyek;
6. Meningkatnya sosialisasi dan membangun koordinais dengan pemerintah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam menghadapi atau mengantisipasi masalah-masalah sosial dalam pelaksanaan proyek;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan OPD teknis terkait.

#### 24. Terkendalinya pemanfaatan ruang

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJiMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah dokumen tataruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda)	1	2	1	50	Cukup Baik
2.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	20	50	50	100	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kategori baik. Namun dalam pencapaian kinerja sasaran yang memiliki beberapa permasalahan yaitu belum selesainya proses revisi Perda RTRW Kabupaten TTU sehingga informasi mengenai turunan RTRW belum tersedia. Untuk mengurangi permasalahan dan menekan faktor penghambat, maka diperlukan langkah strategis yaitu proses revisi RTRW Kabupaten TTU secepatnya diselesaikan agar dapat dibuat turunan RTRW.

## 25. Meningkatnya sarana prasarana air bersih

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	82,06	83,65	83,65	100	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara dengan capaian kinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Permasalahan yang ditemukan dalam capaian sasaran ini adalah masih terdapat keluarga / rumah tangga yang belum menyadari tentang pentingnya penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.

## 26. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	-	30,44	34,44	100	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan capaian kinerja sangat baik. Hal ini mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. TTU 2016-2021 karena diadakan sidak dan tindakan langsung bagi kendaraan angkutan umum baik itu angkutan penumpang maupun angkutan barang sehingga apabila terdapat kendaraan yang belum memiliki KIR maka langsung diadakan test uji kelayakan oleh tim teknis dari Dinas Perhubungan sehingga setiap kendaraan angkutan umum yang melintas di Kabupaten TTU wajib memiliki KIR yang aktif.

Namun dalam upaya pencapaian kinerja sasaran memiliki beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih minimnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan umum akan pentingnya KIR;
2. Masih ditemukan angkutan umum dari luar Kabupaten TTU yang melintas di Kab. TTU yang belum memiliki KIR;
3. Minimnya tenaga teknis untuk uji kelayakan kendaraan angkutan umum;
4. Perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk instansi terkait dalam pencapaian sasaran guna memfasilitasi kepemilikan KIR bagi kendaraan angkutan umum;

Terhadap permasalahan tersebut diatas maka langkah strategis yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan umum tentang pentingnya KIR melalui sidak dan tindakan langsung secara rutin ;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten-Kabupaten tetangga terkait kepemilikan KIR agar angkutan umum dari Kabupaten lain yang melintas di Kab. TTU wajib memiliki KIR;
3. Penambahan tenaga teknis perhubungan darat yang berkompeten dalam pengurusan KIR angkutan umum;
4. Penambahan alokasi anggaran terutama untuk program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengurusan KIR angkutan umum guna tercapainya target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten TTU 2016-2021.

## 27. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	SKPD yang menyusun Renja tepat waktu	25 %	50%	50 %	100%	Sangat Baik

2.	Penduduk ber - e - KTP	63,72 %	70%	80,9%	115,57%	Sangat Baik
3.	Ratio penduduk berakta kelahiran	-	28,84%	27,46%	95,21%	Sangat Baik
4.	Ratio pasangan berakta menikah	-	51,38%	40,77%	79,34%	Baik
5.	SKPD dengan pelaporan keuangan tepat waktu	50%	75%	100%	133,33%	Sangat Baik
6.	Opini pengelolaan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	Baik
7.	Tanah Pemda bersertifikat	-	566 bidang	439	77,56%	Baik
8.	Kondisi bangunan kantor camat kondisi baik	-	22 unit	22 Unit	100%	Sangat Baik
9.	Rumah tangga yang menggunakan listrik	-	50%	48.39%	96,77%	Sangat Baik
10.	Lama proses perijinan	-	7 hari	7 Hari	100%	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan Bapelitbang, Disdukcapil, BKA dan Dinas DMPTSP dengan kategori baik.

Pada indikator sasaran Tanah Pemda bersertifikat adapun kendala yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut serta keterbatasan anggaran yang tersedia. Dan mengakibatkan Opini pengelolaan keuangan daerah masih mendapatkan akreditasi WDP. Hal ini dikarenakan pada pelaporan aset terdapat 1 (satu) pengecualian pada 1 (satu) akun aset tetap dan terdapat 4 (empat) kualifikasi dari BPK terkait penatausahaan aset tetap yang dalam tahun 2017. Solusi yang dilakukan adalah dengan cara menindaklanjuti terkait kualifikasi tersebut sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan pelaporan neraca terhadap aset tetap yang belum diberi nilai. Pada indikator sasaran lain yang dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

## 28. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	SKPD yang didampingi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SKPD)	-	75	75	100%	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset dengan kategori baik. Terkait indikator sasaran SKPD yang didampingi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan target.

### 29. Meningkatnya budaya taat hukum

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Cakupan patroli petugas Sat. Pol (kali)	8	12	12	100	Sangat Baik
2.	Angka kriminalitas tertangani (%)	-	92,72	92,72	100	Sangat Baik
3.	Jumlah demo (kali)	-	3	1	166,67	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Sangat Baik. Pada indikator jumlah demo terealisasi sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017, yakni demo unjuk rasa masyarakat terkait kematian TKW asal Kec. Biboki Anleu atas nama Adolfina Abuk. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kab. TTU memberikan perhatian terhadap kasus yang terjadi dan meminta agar kasus tersebut berjalan sesuai dengan proses hukum.

Adapun kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan terkait sasaran meningkatnya budaya taat hukum adalah masyarakat belum memahami dan mencermati secara seksama Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Kota Kefamenanu sebagai Kotasari. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan pembinaan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak PERDA.

### 30. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8

1.	PNS yang mendapatkan tugas belajar	S1/DIV : 27 S2 : 17	S1/DIV : 32 S2 : 17	S1/DIV : 32 S2 : 21	100%	Sangat Baik
2.	Jumlah mahasiswa ikan dinas kedokteran (orang)	11	5	5	100%	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan dengan kategori sangat baik.

Indikator jumlah aparatur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2 pelaksanaannya yang dibiayai oleh APBD menunjukkan peningkatan yang baik. Pada tahun 2017 yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2 dan dibiayai oleh APBD sebanyak 9 orang.

### 31. Meningkatnya pemanfaatan media dan teknologi

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kondisi Awal RPJMD
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah media yang bekerjasama dengan Pemda (MoU)	-	1	3	300%	Sangat Baik
2.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	-	69	0	0%	Tidak Baik
3.	Website milik pemerintah daerah (unit)	-	1	1	100%	Sangat Baik
4.	Pameran/Expo (kali)	-	1	1	100%	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Pariwisata dengan kategori baik

1. Pada indikator sasaran jumlah media yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah terdapat 3 MoU pada media online yakni :

a. <http://www.savanaparadise.com>

b. <http://www.nttnews.com>

c. <http://www.mediantt.com>



2. Indikator sasaaran pengelolaan arsip secara baku belum tercapai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. hampir diseluruh OPD belum memiliki SOP untuk penataan pengelolaan arsip;
- b. kurangnya tenaga arsiparis;
- c. kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

Selain tidak adanya SOP dan kurangnya tenaga arsiparis menjadi kendala dalam pencapaian target, keadaan sarana tempat penyimpanan arsip atau depo arsip yang digunakan juga masih menggunakan Kantor Daerah yang lama. Kelayakan kriteria bangunan sebagai depo arsip sangatlah jauh dengan kondisi Kantor Daerah yang lama yang jelas menjadi faktor utama penghambat dalam pencapaian sasaran.

Adapun solusi yang dilakukan:

- a. sosialisasi terkait SOP pengelolaan arsip;
- b. pengalokasian tenaga arsiparis pada tahun yang akan mendatang;
- c. peningkatan sarana dan prasarana.

3. Pada indikator website milik pemerintah dalam pencapaian sasaran pemanfaatan media dan teknologi telah terealisasi sesuai dengan target yakni sejumlah 1 unit dan di kelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik.

4. Pada indikator pameran expo dalam pencapaian sasaran telah terealisasi sesuai dengan target yakni sebanyak 1 kali. Adapun kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana yang tersedia.

### 32. Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah dokumen perencanaan	9	8	8	100%	Sangat Baik

	yang tersusun (dokumen)					
2.	Buku "Data dan Informasi Statistik Kabupaten" (buku)	-	1	1	100%	Sangat Baik
3.	Buku "PDRB Kabupaten" (buku)	-	2	2	100%	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Bapelitang dan Dinas Kominfo dan Statistik, dengan kategori sangat baik. Pada pencapaian sasaran mutu perencanaan pembangunan daerah indikator sasaran pada jumlah dokumen perencanaan yang disusun oleh Bapelitbang tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dan Buku Data dan Informasi Statistik Kabupaten serta Buku PDRB Kabupaten terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan dan di koordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik .

### **33. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa**

No	Indikator Kinerja	2016	2017			Kategori
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan BPD terlatih (orang)	483	183	542	296,17 %	Sangat Baik
2.	Presentase desa dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tepat waktu (%)	-	50%	50%	100%	Sangat Baik

Capaian sasaran ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kategori baik. Pada setiap indikator sasaran terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Pada indikator sasaran jumlah pemerintahan desa dan BPD terlatih dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2017. Pada kegiatan pertama setiap desa mengirim 2 orang perwakilan dari semua desa yang berjumlah 183 orang. Kegiatan pelatihan pertama dihadiri oleh setiap desa, sedangkan pada kegiatan pelatihan yang kedua tidak semua desa yang hadir dan total jumlah pelatihan dari kedua kegiatan berjumlah sebanyak 542 orang.

### 34. Berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PSKN

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kota yang dibangun (km)	11,28	18,79	8,9	47,59%	Tidak Baik
2.	Panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun (km)	32,75	44.537,16	17.717,00	39,78%	Tidak Baik
3.	Panjang drainase dalam kota terbangun (km)	20.000	23.000,05	1.021	4,43%	Tidak Baik
4.	Jumlah lampu penerangan jalan terpasang (unit)	-	12 unit	0	0%	Tidak Baik
5.	Penanganan sampah (%)	17,60	22,60	87,71	388,09%	Tidak Baik

1. Pada indikator sasaran panjang jalan kabupaten, panjang jalan lingkungan dan panjang drainase merupakan tugas yang dilaksanakan dan dikoordinasikan pada Dinas PRKPP. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan pembangunan jalan dan drainase yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang di alokasikan pada tahun anggaran 2017. Karena keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan mengakibatkan pencapaian target sasaran yang sesuai dengan RPJMD Kab. TTU tidak dapat berjalan dengan maksimal. Adapun solusi yang akan dilaksanakan adalah melanjutkan pembangunan pada tahun yang akan mendatang dengan harapan kesesuaian antara anggaran dan pencapaian target.
2. Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang pada tahun 2017 belum dapat terealisasi karena pada tahun 2017 anggaran yang tersedia hanyalah kegiatan perawatan lampu jalan. Solusi yang akan dilakukan adalah melaksanakan pemasangan lampu jalan pada tahun yang akan mendatang.
3. Pada indikator sasaran Penanganan sampah dalam pencapaian sasaran Berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Ume Naek Ume Mese dan PSKN terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

### 35. Berkembang kawasan pesisir Pantura

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Jumlah kelompok nelayan terbina (kelompok)	70	74	109	105,71%	Sangat Baik
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	600	648	626,857	96,73%	Sangat Baik
3.	Tertatanya pelabuhan laut Wini (%)	20%	20%	20%	100%	Sangat Baik

1. Pada indikator jumlah kelompok nelayan yang terbina dalam pencapaian sasaran berkembangnya kawasan pesisir Pantura terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Pada indikator produksi perikanan tangkap terdapat selisih sebesar 19,143 ton tangkap ikan. Hal ini dikarenakan hasil tangkapan ikan di pengaruhi oleh cuaca serta arus laut. Dan pada tahun 2017 ada beberapa armada penangkap ikan yang mengalami kerusakan yang menjadi penghambat nelayan dalam menjaring ikan. Kerusakan ini juga dikarenakan faktor cuaca pada saat yang mengakibatkan kebocoran sehingga perlu dilakukan perbaikan. Adapun solusi yang akan dilakukan pada tahun yang akan mendatang yaitu pembuatan alat bantu penangkap ikan/ Rumpon (rumah ikan) untuk meningkatkan jumlah tangkapan.
3. Pada indikator sasaran tertatanya pelabuhan wini dalam pencapaian sasaran berkembangnya kawasan pesisir Pantura terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

### 36. Berkembangnya kawasan perbatasan

No	Indikator Kinerja	2016	2017			
		Kondisi Awal RPJMD	Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	5	6	7	8
1.	Panjang jalan terbangun (km)	31,75	41,75	43,35	103,83%	Sangat Baik
2.	Jumlah jembatan terbangun (unit)	-	1	1	100%	Sangat Baik

Sasaran ini dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pengelola Perbatasan, dengan kategori sangat baik. Dalam pencapaian sasaran berkembangnya kawasan perbatasan terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada bagian ini akan digambarkan tentang analisis kinerja keuangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi juga solusi yang diambil dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

### 1. Analisis Kinerja Keuangan APBD Tahun 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017 dengan target Pendapatan sebesar Rp.1.034.459.989.595,37,- dan anggaran Belanja sebesar Rp.1.082.067.192.211,71,-

Lebih lanjut tentang kinerja keuangan, ringkasan jumlah anggaran, realisasi pendapatan dan belanja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
----	--------	----------	-----------	------------------

1	<b>PENDAPATAN</b>	1.034.459.989.595,37	1.010.667.059.195,59	(23.792.930.399,78)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	77.246.651.285,47	78.554.054.606,59	1.307.403.321,12
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.655.572.498,13	7.458.331.308,56	1.802.758.810,43
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.357.688.116,00	4.693.747.124,00	336.059.008,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.729.760.226,00	8.529.135.608,00	(200.624.618,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	58.503.630.445,34	57.872.840.566,03	(630.789.879,31)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	810.536.587.000,00	788.445.539.509,00	(22.091.047.491,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	13.170.677.000,00	10.090.637.639,00	(3.080.039.361,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	579.318.905.000,00	579.318.905.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	218.047.005.000,00	199.035.996.870,00	(19.011.008.130,00)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	146.676.751.309,90	143.667.465.080,00	(3.009.286.229,90)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.646.983.309,90	20.649.933.213,00	(2.997.050.096,90)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	123.029.768.000,00	123.017.531.867,00	(12.236.133,00)
2	<b>BELANJA</b>	1.082.067.192.211,71	941.693.262.638,80	(140.373.929.572,91)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	645.994.145.395,32	572.714.349.988,00	(73.279.795.407,32)
2.1.1	Belanja Pegawai	407.049.014.295,32	387.311.767.223,00	(19.737.247.072,32)
2.1.4	Belanja Hibah	2.760.000.000,00	1.710.000.000,00	(1.050.000.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	46.793.057.500,00	885.112.500,00	(45.907.945.000,00)
2.1.6	Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	189.392.073.600,00	182.807.470.265,00	(6.584.603.335,00)
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	436.073.046.816,39	368.978.912.650,80	(67.094.134.165,59)
2.2.1	Belanja Pegawai	50.800.463.510,00	44.075.622.650,00	(6.724.840.860,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.428.625.215,08	171.127.042.296,80	(20.301.582.918,28)
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	191.428.625.215,08	171.127.042.296,80	(20.301.582.918,28)
2.2.3	Belanja Modal	193.843.958.091,31	153.776.247.704,00	(40.067.710.387,31)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.116.527.181.807,08)	(1.952.360.321.834,39)	164.166.859.972,69
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	82.607.202.616,34	84.213.234.727,34	1.606.032.111,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	82.607.202.616,34	84.169.601.820,34	1.562.399.204,00
3.1.2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	43.632.907,00	43.632.907,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
3.3	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	(118.187.031.284,13)	(118.187.031.284,13)
3.3.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(118.187.031.284,13)	(118.187.031.284,13)
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	47.607.202.616,34	49.213.234.727,34	1.606.032.111,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	118.187.031.284,13	118.187.031.284,13

Berdasarkan ringkasan APBD tersebut diatas, maka analisis realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Realisasi Pendapatan

Dari tabel di atas target pendapatan sebesar Rp.1.034.459.989.595,37 dengan pencapaian target sebesar Rp.1.010.667.059.195,59 atau 97,70%. Total realisasi pendapatan

menunjukkan angka meningkat dari capaian tahun tahun sebelumnya yang mencapai Rp.904.095.321.369,40 atau 89,71 dari total pendapatan.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.78.554.054.606,59 atau 101,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.77.246.651.285,47 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 55.402.683.733,55 dan yang terealisasi sebesar Rp. 33.511.999.414,00 atau sebesar 60,49%. Angka ini menunjukkan suatu peningkatan baik secara presentase maupun dari nilai capaiannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Masih terdapat kesalahan penetapan nama wajib pajak, alamat/lokasi obyek pajak serta luas tanah;
- b. Adanya perbedaan data penyetoran PBB P-2 antara Bank tempat pembayaran dengan data penyetoran Dinas;
- c. Sebagian besar tanah Pasar dan Pos Terpadu belum bersertifikat;
- d. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB sangat kecil / tidak sesuai dengan kondisi sekarang;
- e. Terdapat wajib pajak yang usahanya ditutup / pindah tanpa melapor kepada petugas;
- f. Kualitas Sumber daya aparatur perpajakan yang belum memadai;
- g. Banyak potensi yang belum digali dan dikelola menjadi sumber pendapatan asli daerah;
- h. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang retribusi daerah dan pajak daerah;

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kedepan untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas antara lain :

- a. Pengkajian potensi daerah yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah;

- b. Pembaharuan data Objek dan Subjek Pajak serta retribusi daerah;
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai;
- d. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah secara continue;
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur dengan mengikuti Bimtek atau magang.

## **2. Realisasi Belanja**

Dari sisi Belanja Daerah, total realisasi tahun 2017 adalah sebesar Rp.941.693.262.638,80 dari target belanja yang dianggarkan sebesar Rp.1.082.067.192.211,71 atau 87,03%. Tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp.964.467.219,53 dan penyerapannya sebesar Rp.778.319.645.020 atau sebesar 80,70%. Tingkat penyerapan anggaran (belanja) tahun ini secara umum dapat dikategorikan baik dan menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tersebut digunakan untuk belanja pada 80 (delapan puluh) SKPD di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari anggaran belanja Kabupaten Timor Tengah Utara alokasi jumlah paling besar dianggarkan untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, yaitu sejumlah Rp.273.222.753.433,00 atau 24,99% dari APBD sedangkan anggaran yang terendah adalah Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sejumlah Rp.174,769,700.00 atau 0.016 % dari APBD yang ditetapkan.

Berikut disampaikan data penetapan anggaran dan realisasi belanja per SKPD tahun anggaran 2017.



Penetapan dan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Timor Tengah Utara Per SKPD Tahun Anggaran 2017

NO	OPD	Anggaran Belanja	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
<b>Sekretariat Daerah</b>					
1	Bagian ekonomi	725,727,679.00	703,221,300.00	22,506,379.00	96.90
2	Bagian Hukum	587,504,828.09	548,734,250.00	38,770,578.09	93.40
3	Bagian Humas	1,337,725,771.00	1,222,999,264.00	114,726,507.00	91.42
4	Bagian Organisasi	1,170,062,000.00	1,142,761,000.00	27,301,000.00	97.67
5	Bagian Pembangunan	1,448,261,125.00	1,235,088,300.00	213,172,825.00	85.28
6	Bagian Sosial	1,106,278,040.00	1,085,355,290.00	20,922,750.00	98.11
7	Bagian Tatapem	1,193,562,839.00	1,101,259,125.00	92,303,714.00	92.27
8	Bagian umum	11,360,885,573.80	10,713,052,356.00	647,833,217.80	94.30
9	Badan Pendapatan	6,920,659,699.00	6,447,927,668.00	472,732,031.00	93.17
10	BPBD	5,070,602,598.00	4,929,705,695.00	140,896,903.00	97.22
11	Badan KESBANGPOL	3,158,322,225.80	3,006,628,921.00	151,693,304.80	95.20
12	BPPD	2,188,630,172.00	2,040,357,360.00	148,272,812.00	93.23
13	BAPELITBANG	5,514,824,676.00	4,885,721,993.00	629,102,683.00	88.59
14	BAPEGDIKLAT	7,735,853,770.50	7,117,190,006.00	618,663,764.50	92.00
15	Badan Keuangan dan Aset	62,573,409,336.94	58,317,964,200.00	4,255,445,136.94	93.20
16	Dinas PKO	270,452,111,570.75	253,881,252,156.00	16,570,859,414.75	93.87
17	Dinas Kesehatan	141,506,205,866.00	121,084,986,905.00	20,421,218,961.00	85.57
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3,507,120,473.50	3,422,879,427.00	84,241,046.50	97.60
19	Dinas DUKAPIL	6,069,577,939.00	5,856,933,633.00	212,644,306.00	96.50
20	Dinas Pariwisata	10,339,915,872.07	5,077,689,915.00	5,262,225,957.07	49.11

NO	OPD	Anggaran Belanja	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Perikanan	4,397,976,496.00	4,150,989,183.00	246,987,313.00	94.38
22	Dinas KOMINFOTIK	4,502,215,380.00	4,437,017,305.00	65,198,075.00	98.55
23	Dinas Koperasi dan UKM	3,291,507,382.31	3,045,325,272.80	246,182,109.51	92.52
24	Dinas Lingkungan Hidup	4,598,279,283.06	4,288,909,801.00	309,369,482.06	93.27
25	Dinas Pangan	9,669,046,876.00	8,735,011,731.00	934,035,145.00	90.34
26	Dinas PMD	8,895,749,913.00	8,786,034,507.00	109,715,406.00	98.77
27	Dinas PPPA	1,936,538,173.00	1,836,896,807.00	99,641,366.00	94.85
28	Dinas PMPTSP	4,020,906,215.00	3,904,035,323.00	116,870,892.00	97.09
29	Dinas PPKB	6,788,980,949.00	6,352,035,481.00	436,945,468.00	93.56
30	Dinas Perhubungan	8,728,568,568.00	8,475,062,705.00	253,505,863.00	97.10
31	Dinas Perindag	7,639,317,766.00	5,110,122,047.00	2,529,195,719.00	66.89
32	Dinas Pertanian	24,445,789,558.00	18,492,094,364.00	5,953,695,194.00	75.65
33	Dinas PRKPP	36,451,456,310.00	33,900,163,058.00	2,551,293,252.00	93.00
34	Dinas Peternakan	8,059,915,091.75	7,751,317,884.00	308,597,207.75	96.17
35	Dinas PUPR	62,632,345,448.98	51,429,834,763.00	11,202,510,685.98	82.11
36	Dinas Sosial	6,519,303,672.30	6,353,353,491.00	165,950,181.30	97.45
37	Dinas NAKERTRANS	4,063,445,005.00	3,956,279,402.00	107,165,603.00	97.36
38	SAT. Pol. PP	4,698,271,435.00	4,663,924,017.00	34,347,418.00	99.27
39	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174,769,700.00	161,649,578.00	13,120,122.00	92.49
40	PPKD	238,945,131,100.00	185,402,582,765.00	53,542,548,335.00	77.59
41	Sekretariat DPRD	18,644,165,044.00	14,700,317,355.00	3,943,847,689.00	78.85
<b>Kecamatan</b>					
42	Miomaffo Timur	390,461,706.51	381,150,000.00	9,311,706.51	97.62
43	Naibenu	319,761,747.10	318,050,000.00	1,711,747.10	99.46
44	Miomaffo Tengah	352,002,922.12	351,858,984.00	143,938.12	99.96
45	Miomafo barat	421,489,626.00	410,600,000.00	10,889,626.00	97.42
46	Mutis	362,573,977.02	360,423,550.00	2,150,427.02	99.41
47	Musi	343,735,913.99	325,000,000.00	18,735,913.99	94.55
48	Biboki anleu	372,678,075.00	354,639,100.00	18,038,975.00	95.16

NO	OPD	Anggaran Belanja	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
49	Biboki Foetleu	357,532,691.01	356,646,550.00	886,141.01	99.75
50	Biboki moenleu	377,722,218.34	377,064,850.00	657,368.34	99.83
51	Biboki selatan	379,580,209.00	379,416,500.00	163,709.00	99.96
52	Biboki Tanpah	334,876,131.12	312,709,250.00	22,166,881.12	93.38
53	Biboki Utara	444,037,298.19	439,969,800.00	4,067,498.19	99.08
54	Bikomi Nilulat	321,973,729.00	320,251,853.00	1,721,876.00	99.47
55	Bikomi Selatan	380,106,547.00	376,735,059.00	3,371,488.00	99.11
56	Bikomi Tengah	358,768,402.00	264,222,000.00	94,546,402.00	73.65
57	Bikomi Utara	356,760,554.19	349,994,500.00	6,766,054.19	98.10
58	Insana barat	430,263,097.34	418,126,250.00	12,136,847.34	97.18
59	Insana Fafinesu	327,092,802.00	325,140,800.00	1,952,002.00	99.40
60	Insana Tengah	353,166,492.00	347,400,000.00	5,766,492.00	98.37
61	Insana Utara	335,570,255.48	329,817,300.00	5,752,955.48	98.29
62	Insana	548,106,917.00	499,983,800.00	48,123,117.00	91.22
63	Kota Kefamenanu	1,356,226,328.29	1,316,778,250.00	39,448,078.29	97.09
64	Noemuti	417,666,530.00	417,666,530.00	0.00	100
65	Noemuti Timur	316,531,587.64	316,000,000.00	531,587.64	99.83
66	DPRD	6,952,597,800.00	6,762,492,829.00	190,104,971.00	97,26
67	Inspektorat	6,299,072,714.34	6,196,935,294.00	102,137,420.34	98.38
68	RSUD	44,638,284,410.99	38,458,156,342.00	6,180,128,068.99	86.16
69	Sekretariat KORPRI	1,075,630,116.00	871,368,644.00	204,261,472.00	81.01
<b>TOTAL</b>		<b>1,082,067,192,211.71</b>	<b>938,132,063,632.80</b>	<b>143,935,128,578.91</b>	<b>86.70</b>

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.49.213.234.727,34,- atau 103,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp.47.607.202.616,34,- Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, pembiayaan Netto sebesar Rp.112.544.474.664,48,- atau 99,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp.112.696.807.010,48,- Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut :

**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.84.169.601.820,34 atau 101,89% dari total penetapan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.82.607.202.616,34. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.128.544.474.664,48.- atau 100,01 % dari total penetapan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 128.696.807.010,48

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan terealisasi TA. 2017 sebesar Rp.35.000.000.000,- atau sebesar 100 % dari jumlah yang ditetapkan sebesar Rp.35.000.000.000,- sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi TA. 2016 sebesar Rp. 16.000.000.000,00.- atau 100 % dari jumlah yang ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000.000.- dari target yang ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan ini bersumber dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Permasalahan umum yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a. Jumlah sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset (tenaga akuntansi) yang masih sangat terbatas;
- b. Pemahaman aparatur pengelolaan keuangan yang minim tentang IT terutama dalam penggunaan SIMDA;

- c. Pengelolaan aset yang belum optimal;
- d. Masih rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pengelolaan aset;

Solusi yang diambil guna mengatasi beberapa persoalan di atas antara lain sebagai berikut :

- a. Perekrutan dan atau penempatan tenaga akuntansi pada setiap SKPD khususnya yang mengelola keuangan dan aset;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat / bimtek serta melalui *pelaksanaan* studi banding ataupun magang.

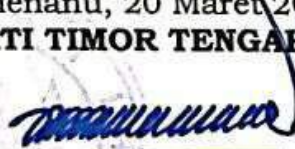
Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kewenangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui dokumen ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mempertanggungjawabkan / melaporkan setiap tahunnya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021. Pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun ini, dapat disimpulkan berkategori baik dalam pencapaiannya, meskipun belum sepenuhnya memenuhi yang seharusnya diharapkan.

Demikian dokumen ini, semoga menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi setiap komponen dalam manajemen pembangunan pada waktu-waktu mendatang.

Kefamenanu, 20 Maret 2018

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

  
**RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S. Pt**